



Laporan Tahunan 2019

- LRT Jakarta Goes to Commercial -





DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Tugas Pokok PT LRT Jakarta	4
Rute Layanan LRT Jakarta	5
Perjalanan dan Pencapaian 2019	6
Rencana Pengoperasian LRT Jakarta	8

PERFORMA 2019

Ikhtisar Data Keuangan Penting	11
Informasi Tentang Ikhtisar Saham	12
Informasi Tentang Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Efek Lainnya	13
Informasi Tentang Sumber Pendanaan	13

LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris	16
Laporan Direksi	18
Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019 PT LRT Jakarta	20

PROFIL PERUSAHAAN

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan	24
Riwayat Singkat Perusahaan	25
Bidang Usaha	27
Struktur Organisasi	28
Visi, Misi Perusahaan	30
Nilai-Nilai Perusahaan	31
Makna Logo Perusahaan	37
Profil Dewan Komisaris	33
Profil Direksi	34
Demografi Karyawan	37
Komposisi Pemegang Saham	41
Informasi Pada Website Perusahaan	42

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Kesiapan Operasi	46
Kesiapan Legalitas, Perizinan, dan Regulasi lainnya	55
Tinjauan Keuangan	78
Proyeksi Tahun 2020	93
Prospek Perusahaan	93
Aspek Pemasaran Dan Pangsa Pasar	95
Informasi Mengenai Rencana Penambahan Modal Melalui Inbreng	96

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERSEROAN

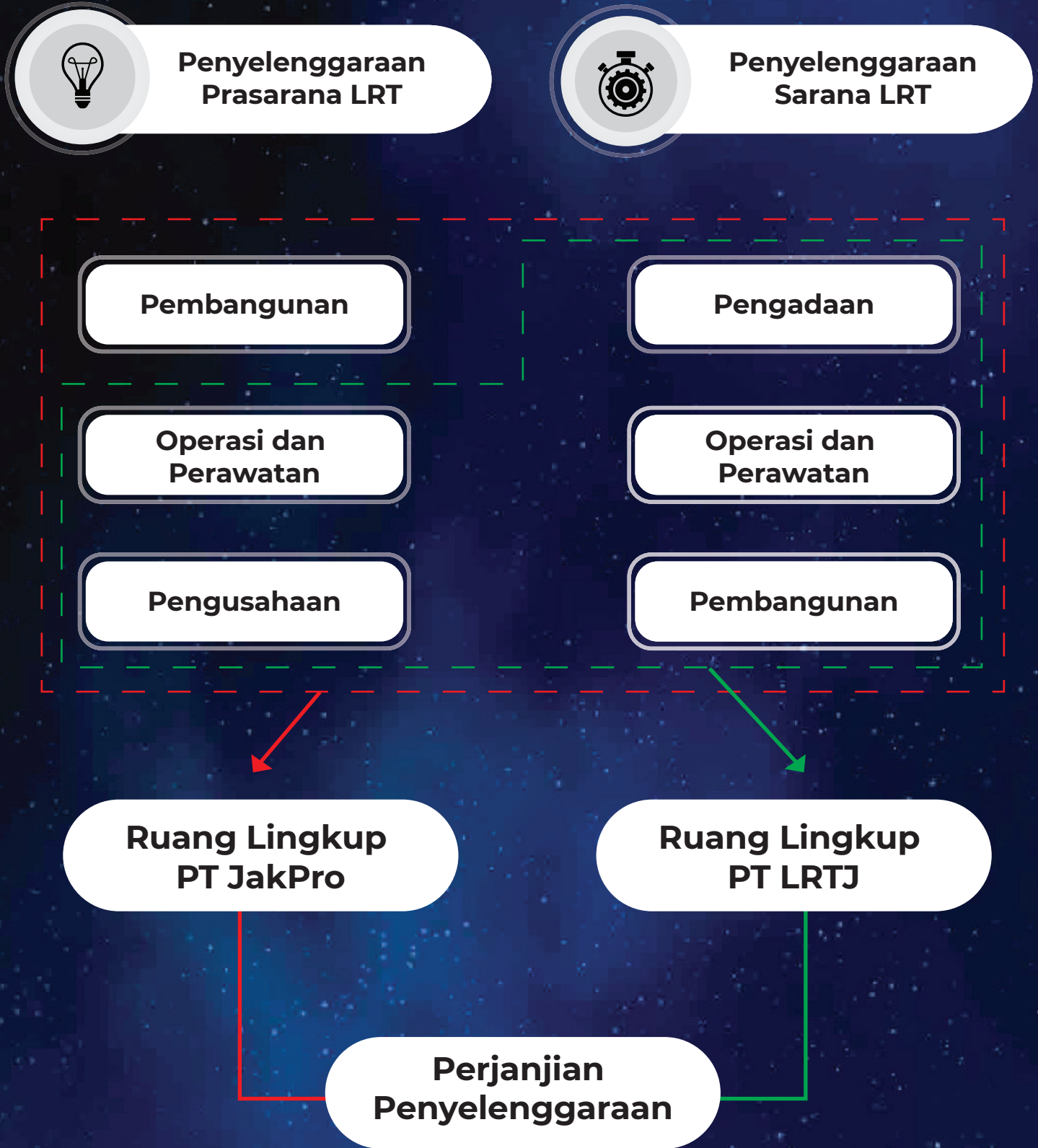
Komitmen Untuk Lingkungan Hidup	99
Tanggungjawab Sosial Atas Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	99

TATA KELOLA PERSEROAN

Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan	102
Manajemen Risiko	107
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	110
Sistem Pengendalian Internal	110
Audit Eksternal	110
Akses Informasi dan Data Perusahaan	111

TUGAS POKOK PT LRT JAKARTA

Tugas pokok PT LRT Jakarta meliputi penyelenggaraan Prasarana dan Sarana moda transportasi LRT Jakarta; melakukan Operasi dan Pemeliharaan LRT Jakarta dan mengembangkan bisnis melalui usaha properti di stasiun dan kawasan sekitarnya.



LAYANAN INTEGRASI LRT JAKARTA



PERJALANAN DAN PENCAPAIAN 2019

Jan

- Internship/Kunjungan Studi SDM Operasi dan Pelayanan pada PT Transportasi Jakarta, PT Railink, PT Angkasa Pura 2, dan PT KCI.
- Kegiatan SAT Prasarana, Persiapan OCC Room, dan OIT 5 Stasiun Mainline.
- Persiapan integrasi fisik LRT – BRT di Stasiun Velodrome – Halte Pemuda Rawamangun.

Feb

- Simulasi Tanggap Darurat / Fire Drill di Stasiun Velodrome.
- Terbitnya Sertifikasi Sarana LRV 5-8 oleh Balai Pengujian Kemenhub RI.
- Pengujian Prasarana Jalur Section 5B, Stasiun Mainline dan Fasilitas Operasi oleh Balai Pengujian Kemenhub RI.

Mar

- Persiapan Trial Run, Kolaborasi LRTJ – JAK-24.
- Pengesahan SOP Pengoperasian oleh Kemenhub RI.
- Penetapan Tarif LRT Jakarta melalui Pergub DKI Jakarta No. 34/2019.
- Rekomendasi Teknis untuk Jalur, Bangunan, dan Fasilitas Operasi.

Apr

- Trial Run LRT Jakarta.
- Pengesahan SOP Pemeriksaan dan Perawatan oleh Kemenhub RI.
- Sertifikasi SDM Pengendali Operasi, Perawatan Sarana, Pemeriksa dan Perawatan Fasilitas Operasi.

Mei

- Trial Run LRT Jakarta.
- Sosialisasi dan Edukasi Budaya Baru Bertransportasi Publik.

Jun

- Uji Publik LRT Jakarta.
- Konferensi Pers Persiapan Operasi Komersial LRT Jakarta.
- Kick-off ISO & SMK3.
- Perjanjian Kerjasama Penerimaan Uang Elektronik.

PERJALANAN DAN PENCAPAIAN 2019

Jul

- Kick Off Layanan Integrasi Skybridge antara Stasiun Velodrome LRT Jakarta dengan Transjakarta Halte Pemuda Rawamangun.
- Penggunaan Kartu Uang Elektronik diseluruh Stasiun LRT Jakarta yaitu Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan Bank DKI.
- Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana LRT telah diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Agust

- Penerbitan IMB 6 Stasiun dan Depo LRT Jakarta.
- Food Bazaar Pasar Kita Goes to LRT Jakarta bersama sahabat UMKM.
- Fashion Show di dalam kereta LRT JFFF 2019.

Sept

- Pembukaan Stasiun LRT Pegangsaan Dua.
- Uji Berkala Kereta LRT Jakarta (LRV 1-4) oleh Balai Pengujian Kemenhub RI.
- Penerbitan Izin Usaha Prasarana LRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Pengujian Keseluruhan Depo LRT Jakarta.

Okt

- Penerbitan Izin Operasi Sarana LRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Pembukaan Rute Baru Integrasi LRT – BRT, Rute 10F Pegangsaan Dua – Sunter.

Nov

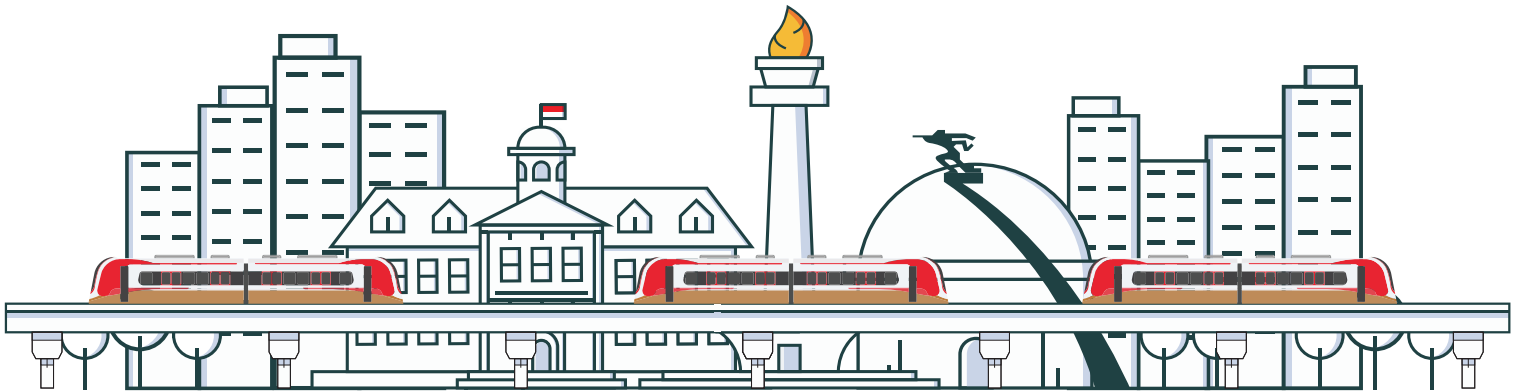
- Penerbitan Izin Operasi Prasarana LRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Penetapan GAPEKA LRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Penerbitan Izin Pembangunan Perkeretaapian Umum oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Persetujuan Desain untuk Pelaksanaan Konstruksi (KKJTJ) oleh KemenPUPR RI.
- Penandatanganan MoU antara PT LRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta tentang Integrasi Operasi Moda Transportasi Umum.
- Konferensi Pers Operasi Komersial LRT Jakarta.

Des

- Operasi Komersial LRT Jakarta.
- Penetapan Subsidi LRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Ramp Check Keseluruhan SPM LRT Jakarta oleh Dishub DKI Jakarta dengan pencapaian nilai 97.15%

RENCANA PENGOPERASIAN LRT JAKARTA

Jadwal Operasional Weekdays or Weekend / Holidays



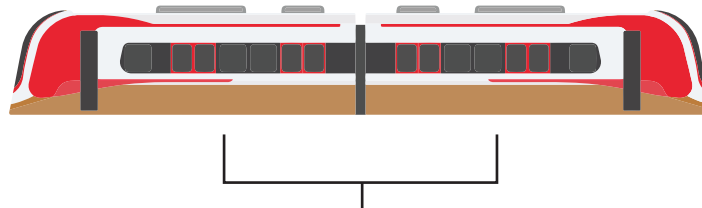
Waktu Operasi : 18,5 Jam



Waktu Tempuh dari St. PGD ke St. VLD selama 13 menit dengan Dwelling Time : 30 detik, waktu tunggu di stasiun ujung : 7 menit



Headway : 10 Menit sebanyak



1 LRV : 2 Cars



Jumlah KA : 4 Operasi ;
2 Cadangan ; 2 Perawatan



Satu trainset LRV : 40 tempat
duduk dan 230 penumpang



Lebar Rel : 1.435



Sumber Daya Kereta :
750 DC menggunakan rel ketiga



Sistem Persinyalan :
Fix Block

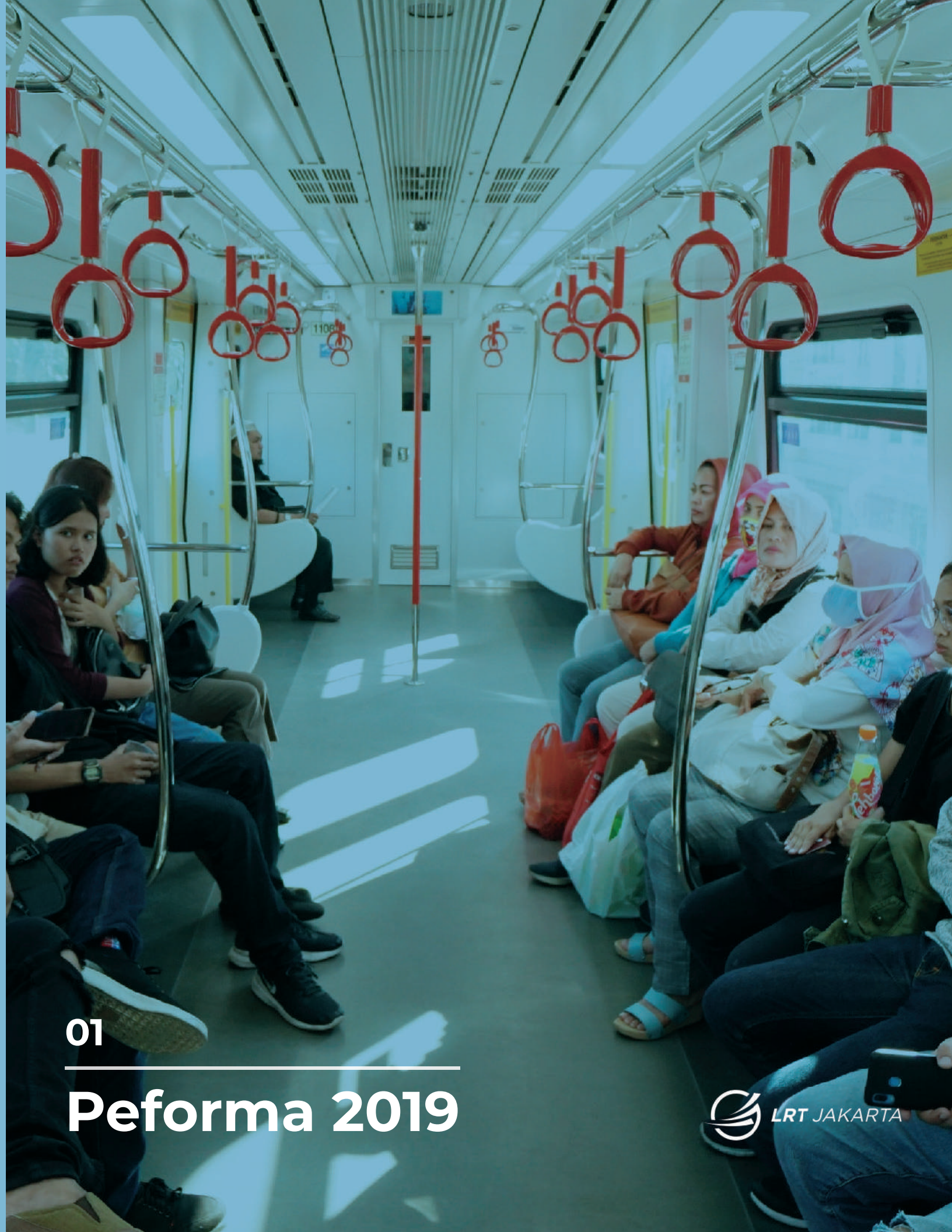


Lintasan Kereta
* Total Jarak ± 5,8 Km
* Kecepatan Operasi : 55

Stasiun Operasional :







01

Peforma 2019

PERFORMA 2019

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laba (Rugi) dan penghasilan komprehensif lain

Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	YoY
	Rp (<i>Audited</i>)	Rp (<i>Audited</i>)	2018-2019 (%)
Pendapatan	6.803.940.369	--	n/a
Beban Pokok Penjualan	(12.916.272.058)	--	n/a
Laba (Rugi) Kotor	(6.112.331.689)	--	n/a
beban Usaha	(55.173.587.650)	(13.947.434.188)	295,58%
Pendapatan/Beban Lainnya	6.003.567.731	3.220.748.567	86,40%
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(55.282.351.608)	(10.726.685.620)	415,37%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	14.578.279.359	3.482.344.128	318,63%
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(40.704.072.250)	(7.244.341.492)	461,87%

Keterangan: Perusahaan mulai beroperasi secara komersial per tanggal 1 Desember 2019, dengan demikian angka pendapatan dalam laporan laba/rugi Perusahaan adalah pendapatan untuk periode 1 bulan.

Posisi Keuangan

Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	YoY
	Rp (<i>Audited</i>)	Rp (<i>Audited</i>)	2018-2019 (%)
Aset Lancar	77.462.279.129	140.747.661.339	-44,96%
Aset Tidak Lancar	36.397.039.491	5.929.255.310	513,86%
Jumlah Aset	113.859.318.621	146.676.916.649	-22,37%
Liabilitas Jangka Pendek	9.796.383.574	3.609.795.344	171,38%
Liabilitas Jangka Panjang	2.011.348.789	311.462.797	545,77%
Jumlah Liabilitas	11.807.732.363	3.921.258.141	201,12%
Jumlah Ekuitas	102.051.586.258	142.755.658.508	-28,51%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	113.859.318.621	146.676.916.649	-22,37%

Keterangan: Perusahaan tidak memiliki entitas asosiasi/ventura bersama, dengan demikian tidak terdapat informasi tentang investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama.

Rasio-Rasio Keuangan

Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	YoY
	Rp (<i>Audited</i>)	Rp (<i>Audited</i>)	2018-2019 (%)
Rasio Lancar	7,91	38,99	-79,72%
Rasio Kas	6,80	38,03	-82,12%
Quick Ratio	7,46	38,83	-80,79%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	0,12	0,03	321,23%
Rasio Utang Jangka Pendek untuk Ekuitas	0,10	0,03	279,63%
Rasio Utang Jangka Panjang untuk Ekuitas	0,02	0,00	803,35%
Rasio Utang Terhadap Aset	0,10	0,03	287,91%

INFORMASI TENTANG IKHTISAR SAHAM

JUMLAH SAHAM

Jumlah saham perusahaan sebanyak 150.000 lembar saham, dengan kepemilikan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebanyak 148.500 lembar atau 99% dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebanyak 1.500 lembar atau 1% dari seluruh jumlah saham perusahaan. Perusahaan tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan.

INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Hingga 31 Desember 2019 Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafis yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

Di sepanjang 2019, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

DIVIDEN SAHAM

Sejak berdirinya hingga November 2019, Perusahaan belum beroperasi secara komersial. Baru pada tanggal 1 Desember 2019 Perusahaan mulai beroperasi secara komersial, namun hingga akhir tahun 2019 Perusahaan belum membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta keputusan pemegang saham.

INFORMASI TENTANG IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA EFEK LAINNYA

Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang jumlah obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, serta peringkat obligasi/sukuk.

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan proyek LRT Jakarta 100% didapatkan dari dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui skema Penanaman Modal Daerah (PMD) yang disalurkan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemanfaatan dana PMD tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo sehingga tidak tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan.



bella terra

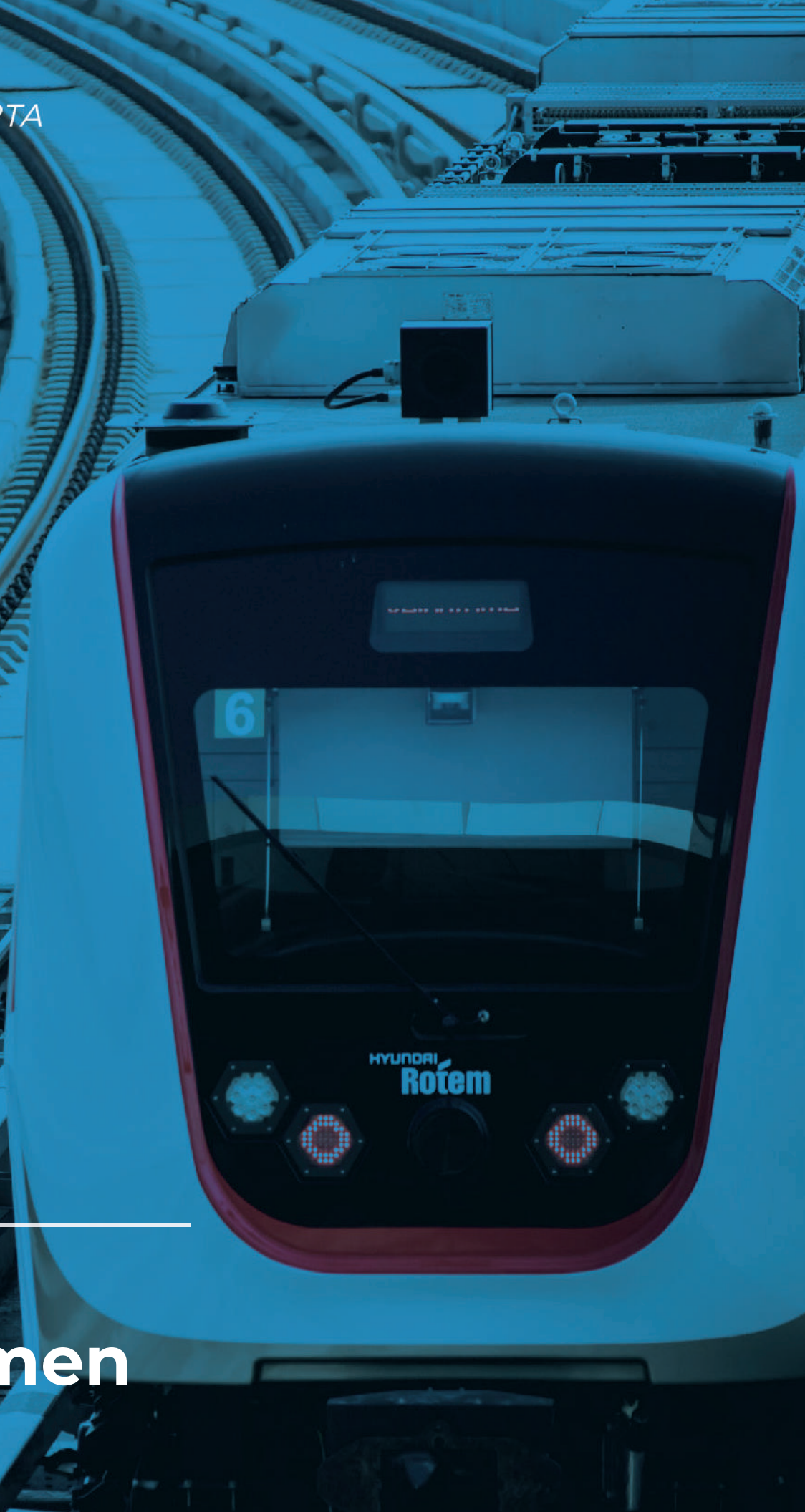
TOP OF THE WHOPPER

WATERBURY

WATERBURY

02

Laporan Manajemen



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Selama tahun 2019, perkembangan transportasi publik di Wilayah Jakarta terus tumbuh dengan peningkatan jumlah pengguna transportasi publik yang terus meningkat setiap tahunnya, Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, setiap hari terdapat sekitar 7 – 8 juta pengguna transportasi umum di DKI Jakarta.

Makin tingginya pengguna transportasi publik di DKI Jakarta dan sekitarnya tersebut merupakan salah satu *concern* utama Dewan Komisaris dalam memperhatikan terjadinya penambahan jumlah pengguna serta implementasi integrasi antar moda transportasi yang direncanakan untuk diterapkan dalam beberapa tahun kedepan saat MRT dan LRT resmi beroperasi.

Penilaian atas Implementasi Strategi Perseroan Tahun 2019.

Dewan Komisaris juga menyambut baik jumlah pengguna LRT Jakarta pada saat *trial run* LRT Jakarta yang cukup antusias setiap harinya.

Disisi lain, Dewan Komisaris juga terus menghimbau Manajemen untuk terus melakukan penyempurnaan sistem dan peraturan, khususnya terkait persiapan pengoperasian LRT Jakarta. Langkah tersebut merupakan perwujudan dari komitmen untuk mewujudkan tercapainya penggunaan transportasi umum dan integrasi antar moda transportasi di DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Dewan Komisaris juga menghimbau Direksi dan seluruh manajemen untuk terus menempatkan komitmen keamanan, keandalan dan kenyamanan penumpang sebagai landasan utama dalam mengembangkan bisnis serta terus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di berbagai bidang guna mendukung visi perusahaan yaitu menjadi solusi mobilitas publik terbaik di Indonesia.

Penilaian atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris memandang bahwa tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk menyediakan layanan transportasi publik berbasis rel di Jakarta.

Dengan terobosan dan menggunakan teknologi yang aman dan handal dalam operasionalisasi LRT Jakarta, dapat membawa peluang tersendiri bagi Perusahaan. Keunggulan teknologi tersebut harus terus ditingkatkan dengan peningkatan sarana,

persiapan awak untuk operasi sarana, program edukasinya agar implementasi integrasi antar moda transportasi publik dapat dieksekusi secara lancar.

Peran Dewan Komisaris Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas Perusahaan, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pencapaian target kinerja Perusahaan. Secara umum, Dewan Komisaris menilai Perusahaan telah dijalankan dengan baik dengan tingkat kepatuhan yang terus meningkat.

Penutup

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kinerja Perusahaan selama tahun 2019. Kepada Pemegang saham, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada Perusahaan selama tahun 2019, juga kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang diberikan kepada Perusahaan.

Kami juga berterima kasih atas kerja keras Direksi, pegawai dan seluruh pihak yang bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan tersedia layanan LRT Jakarta yang andal, aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat.

Akhir kata, marilah kita terus dukung solusi angkutan masal dengan menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama masyarakat melalui penyediaan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau.

Jakarta, 15 Juni 2020



M. Hanief Arie Setianto

Komisaris

LAPORAN DIREKSI

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2019 merupakan tahun yang bersejarah bagi Perusahaan, dimana pada tahun ini, Perusahaan mulai mengoperasikan LRT Jakarta secara komersial. Setelah menjalani proses *Trial Run* dan beroperasi penuh tanpa tarif, akhirnya diputuskan LRT Jakarta beroperasi secara komersial per tanggal 1 Desember 2019.

Pada kinerja keuangan, per 31 Desember 2019, Perusahaan membukukan rugi bersih komprehensif sebesar Rp 40,70 miliar atau 312,78% dari rencana kerja anggaran tahun 2019 sebesar Rp 13,01 miliar. Pencapaian rugi bersih ini melebihi target yang direncanakan terutama disebabkan oleh pergeseran dimulainya operasi komersial yang semula direncanakan mulai beroperasi komersial pada bulan Juni 2019 menjadi mulai beroperasi komersial pada bulan Desember 2019, hal ini menyebabkan target pendapatan tidak sesuai dengan pencapaian.

Untuk beban pokok penjualan, realisasi tahun 2019 sebesar Rp 12,92 miliar atau 11,98% dari rencana kerja anggaran tahun 2019 sebesar Rp 107,78 miliar. Realisasi beban pokok penjualan ini jauh dibawah yang direncanakan juga disebabkan oleh pergeseran dimulainya operasi komersial yang semula direncanakan mulai beroperasi komersial pada bulan Juni 2019 menjadi mulai beroperasi komersial pada bulan Desember 2019. Untuk beban administrasi & umum, realisasi tahun 2019 sebesar Rp 55,17 miliar atau 86,64% dari rencana kerja anggaran tahun 2019 sebesar Rp 63,68 miliar. persiapan Perusahaan untuk dapat mengoperasikan LRT Jakarta diimplementasikan melalui peningkatan jumlah karyawan menjadi 272 karyawan di tahun 2019 serta peningkatan biaya pelatihan yang difokuskan untuk menunjang layanan penumpang pada saat LRT Jakarta beroperasi secara komersial.

Apresiasi

Sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna dan konsumen utama, Direksi mewakili seluruh manajemen menyampaikan terima kasih mendalam kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas komitmen dan dukungan yang diberikan. Kami juga berterima kasih kepada Dewan Komisaris atas setiap rekomendasi dan nasihat yang diberikan serta kepada seluruh pegawai atas kerja keras dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas dan kerjasama yang baik dalam mencapai target kinerja Perusahaan tahun 2019.

Jakarta, 15 Juni 2020



M. Wijanarko
Direktur Utama

**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019
PT LRT JAKARTA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT LRT Jakarta tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Juni 2020

Direksi



Wijanarko

Direktur Utama



G. Indarto Wibisono
Direktur Operasi dan Perawatan



Rudy Hartono
Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis



03

Profil Perusahaan

“

*LRT Jakarta
menyediakan layanan
transportasi publik
warga Jakarta yang
aman dan nyaman*

”

PROFIL PERUSAHAAN

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	PT LRT JAKARTA
Tanggal Pendirian	16 April 2018
Dasar Hukum Pendirian	Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT LRT Jakarta No. 10 tanggal 16 April 2018 dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, Sh, M.Kn, Notaris di Jakarta Pendirian Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-002380.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 17 April 2018
Status Perusahaan	Anak Perusahaan BUMD
Bidang Usaha	Penyelenggara Sarana dan Prasarana Kereta Api
Kegiatan Usaha	Pengoperasian dan Perawatan Sarana serta Prasarana
Kepemilikan	PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 99,0% PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 1,0%
Modal Dasar	Rp600.000.000.000,00 di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M. KN dalam Akta No. 10 tanggal 16 April 2018 yang terdiri dari: 1500 lembar saham PT Jakarta Infrastruktur Propertindo senilai Rp1.500.000.000,00 148.500 lembar saham PT Jakarta Propertindo (Perseroda) senilai Rp148.500.000.000,00
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	Rp150.000.000.000,00 sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 16 April 2018 di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M. KN, Notaris di Jakarta
Kantor Pusat	Gedung MCC – Depo LRT Jakarta Jl. Raya Kelapa Nias, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia 14250
Depo LRT	Jl Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250

RIWAYAT SINGKAT LRT JAKARTA



Dengan semakin meningkatnya penggunaan alat transportasi di DKI Jakarta, dan disisi lain pertumbuhan sarana berupa jalan yang semakin sulit berdampak pada semakin parahnya tingkat kemacetan di dalam kota. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah DKI Jakarta telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengembangkan sistem transportasi berbasis rel.

PT Jakarta Propertindo sebagai Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta terpanggil untuk turut serta membantu pemerintah untuk segera merealisasikan program tersebut dengan membangun proyek LRT Jakarta. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 154 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (4) yang merupakan tonggak awal didirikannya anak perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu agar Prasarana dan Sarana LRT dapat dioperasikan, dirawat dan/atau diusahakan secara efisien, efektif dan sesuai tata kelola yang baik.

PT LRT Jakarta (“Perseroan”) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda), berdiri pada tanggal 16 April 2018.

PT LRT Jakarta (PT LRT) didirikan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 16 April 2018 dari Nanda Fauz Iwan, Sh, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0020380.AH.01.01, tanggal 17 April 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT LRT Jakarta. Saat

ini PT LRT Jakarta berdomisili di Gedung Thamrin City, Lantai 1, Lobby Timur, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat, 10340, Indonesia.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Sejak berdirinya pada 16 April 2018 hingga 31 Desember 2019, Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian nama, yaitu PT LRT Jakarta.

BIDANG USAHA

Bidang Usaha PT LRT Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta No.25 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta adalah sebagai Penyelenggara Sarana dan Parasaran Kereta Api. Berdasarkan pasal 3 (tiga) Akta tersebut, ruang lingkup usaha Perusahaan mencakup:

PT LRT JAKARTA

- Angkutan Jalan Rel Perkotaan
- Konstruksi Jalan Rel & Jembatan Rel
- Konstruksi Bangunan Elektrikal
- Konstruksi Sinyal & Telekomunikasi Kereta Api
- Konstruksi Jaringan Elektrikal & Telekomunikasi Lainnya
- Reparasi Lokomotif & Gerbong Kereta
- Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
- Instalasi Listrik
- Instalasi Sinyal & Telekomunikasi Kereta Api
- Aktivitas Stasiun Kereta Api
- Pengadaan Kargo (Bongkar Muat Barang)
- Jasa Pengurusan Transportasi
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api & Ekspedisi
- Aktivitas Telekomunikasi dengan dan Tanpa Kabel

PT LRT JAKARTA

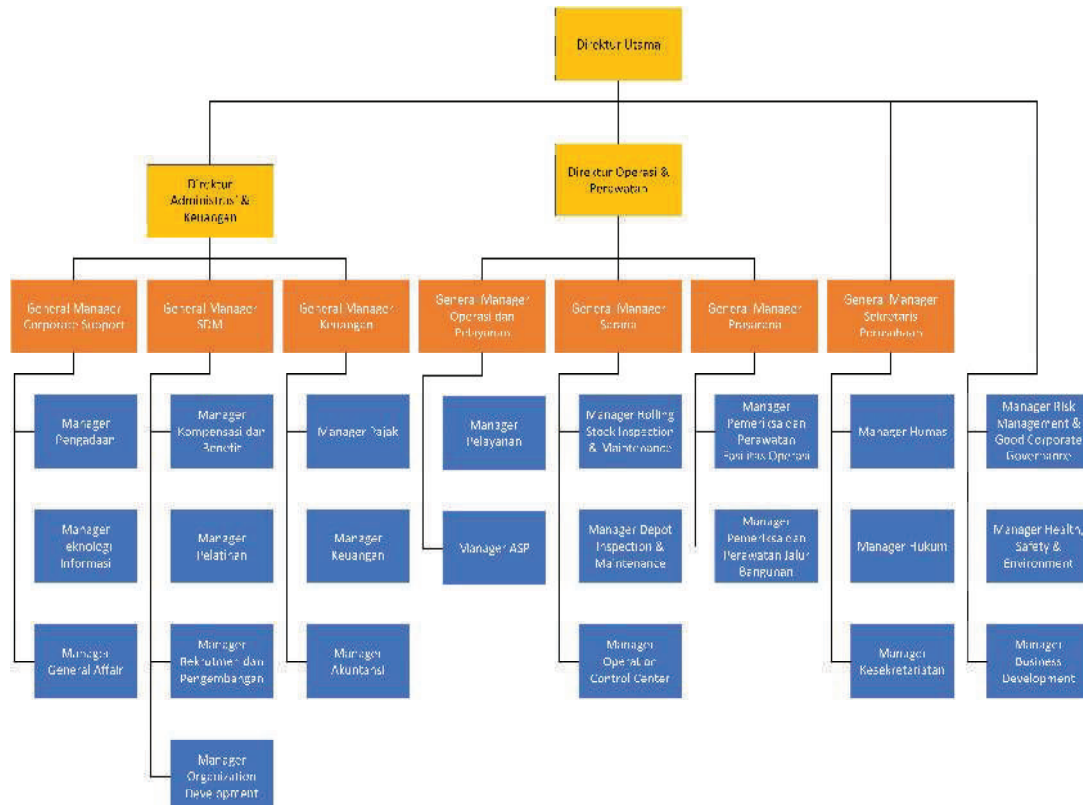
- Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
- Aktivitas Konsultasi Transportasi
- Jasa Inspeksi Periodik
- Periklanan
- Aktivitas Penyewaan & Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat
- Pendidikan Lainnya Swasta

STRUKTUR ORGANISASI

Di sepanjang tahun 2019, struktur organisasi Perusahaan mengalami 1 (satu) kali pergantian, sebagai bagian dari persiapan organisasi dan kebutuhan Perusahaan terkait pengoperasian LRT Jakarta yang ditargetkan akan beroperasi pada Desember 2019.

Struktur 1

Struktur organisasi Perusahaan sejak Oktober tahun 2018 - 1 September 2019



Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Melalui keputusan pemegang saham pada tanggal 25 Oktober 2019, susunan dan komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2019.

Kronologis Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang tahun 2019		
Periode 1 Januari 2019 - 25 Oktober 2019	Periode 25 Oktober 2019 - 31 Desember 2019	Keterangan
Satya Heragandhi		Satya Heragandhi tidak lagi menjabat dalam Komisaris sejak tanggal 25 Oktober 2019.
	M Hanief Arie Setianto	M Hanief Arie Setianto duduk dalam Komisaris sejak tanggal 25 Oktober 2019.

Perubahan Komposisi Direksi

Melalui keputusan pemegang saham pada tanggal 25 Oktober 2019, susunan dan komposisi Direksi mengalami perubahan. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Direksi di sepanjang tahun 2019.

Kronologis Susunan Direksi di Sepanjang tahun 2019				
Periode 1 Januari - 28 Juli 2019	Periode 22 Juli - 28 Juli 2019	Periode 28 Juli - 25 Oktober 2019	Periode 25 Oktober - 31 Desember 2019	Keterangan
Allan Tandiono	Allan Tandiono			Allan Tandiono tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 28 Juli 2019
Solihin Djaelani	Solihin Djaelani	Solihin Djaelani		Solihin Djaelani tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak tanggal 25 Oktober 2019
	Wijanarko	Wijanarko	Wijanarko	Wijanarko duduk dalam Jajaran Direksi sejak tanggal 22 Juli 2019, Wijanarko menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 28 Juli 2019, dan diangkat menjadi Direktur Utama sejak tanggal 25 Oktober 2019
			Rudy Hartono	Rudy Hartono duduk dalam Jajaran Direksi sejak tanggal 25 Oktober 2019
			G Indarto Wibisono	G Indarto Wibisono duduk dalam Jajaran Direksi sejak tanggal 25 Oktober 2019

VISI DAN MISI

VISI



*Menjadi solusi
mobilitas publik
terbaik di Indonesia* ”

MISI

- Menyediakan layanan transportasi publik warga Jakarta yang aman dan nyaman,
- Mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan terintegrasi, serta
- Membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang LRTJ.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Organisasi yang menjadi acuan dalam berperilaku di LRT Jakarta tentang *Code of Conduct* yang akan diputuskan dalam Surat Keputusan Direksi. Nilai-nilai tersebut adalah “**LRTJ**” yaitu:

LINCAH (*Agile*)

Kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apapun kebutuhan pelanggan, bebas dari kungkungan jabatan dan paparan tugas yang diemban.

RAMAH (*Hospitable*)

Kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai tanggungjawab masing-masing dan bahkan lebih dari itu, dengan tulus dan dilandasi dengan niat yang murni untuk melayani pelanggan.

TERPERCAYA (*Reliable*)

Kehandalan dalam melaksanakan tugas, yang ditunjukkan dengan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta komitmen untuk melaksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sasaran dan tata cara yang telah ditetapkan.

JUJUR (*Honest*)

Melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat dengan tulus dari hati, berani bertanggungjawab atas hasil kerja atau perbuatan sendiri dan taat pada semua peraturan yang berlaku.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Organisasi yang menjadi acuan dalam berperilaku di LRT Jakarta tentang *Code of Conduct* yang akan diputuskan dalam Surat Keputusan Direksi. Nilai-nilai tersebut adalah “**LRTJ**” yaitu:

LINCAH (*Agile*)

Kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apapun kebutuhan pelanggan, bebas dari kungkungan jabatan dan paparan tugas yang diemban.

RAMAH (*Hospitable*)

Kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai tanggungjawab masing-masing dan bahkan lebih dari itu, dengan tulus dan dilandasi dengan niat yang murni untuk melayani pelanggan.

TERPERCAYA (*Reliable*)

Kehandalan dalam melaksanakan tugas, yang ditunjukkan dengan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta komitmen untuk melaksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sasaran dan tata cara yang telah ditetapkan.

JUJUR (*Honest*)

Melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat dengan tulus dari hati, berani bertanggungjawab atas hasil kerja atau perbuatan sendiri dan taat pada semua peraturan yang berlaku.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Organisasi yang menjadi acuan dalam berperilaku di LRT Jakarta tentang *Code of Conduct* yang akan diputuskan dalam Surat Keputusan Direksi. Nilai-nilai tersebut adalah “**LRTJ**” yaitu:

LINCAH (*Agile*)

Kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apapun kebutuhan pelanggan, bebas dari kungkungan jabatan dan paparan tugas yang diemban.

RAMAH (*Hospitable*)

Kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai tanggungjawab masing-masing dan bahkan lebih dari itu, dengan tulus dan dilandasi dengan niat yang murni untuk melayani pelanggan.

TERPERCAYA (*Reliable*)

Kehandalan dalam melaksanakan tugas, yang ditunjukkan dengan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta komitmen untuk melaksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sasaran dan tata cara yang telah ditetapkan.

JUJUR (*Honest*)

Melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat dengan tulus dari hati, berani bertanggungjawab atas hasil kerja atau perbuatan sendiri dan taat pada semua peraturan yang berlaku.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Organisasi yang menjadi acuan dalam berperilaku di LRT Jakarta tentang *Code of Conduct* yang akan diputuskan dalam Surat Keputusan Direksi. Nilai-nilai tersebut adalah “**LRTJ**” yaitu:

LINCAH (*Agile*)

Kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apapun kebutuhan pelanggan, bebas dari kungkungan jabatan dan paparan tugas yang diemban.

RAMAH (*Hospitable*)

Kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik, sesuai tanggungjawab masing-masing dan bahkan lebih dari itu, dengan tulus dan dilandasi dengan niat yang murni untuk melayani pelanggan.

TERPERCAYA (*Reliable*)

Kehandalan dalam melaksanakan tugas, yang ditunjukkan dengan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta komitmen untuk melaksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sasaran dan tata cara yang telah ditetapkan.

JUJUR (*Honest*)

Melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat dengan tulus dari hati, berani bertanggungjawab atas hasil kerja atau perbuatan sendiri dan taat pada semua peraturan yang berlaku.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN



Logo LRT Jakarta mengambil gambar lingkaran utuh membentuk 3 garis yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk kereta api LRT Jakarta yang bergerak maju dan progresif di bidang perkeretaapian. Warna merah mencerminkan keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dengan warna emas merepresentasikan prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan dan kemakmuran. Warna merah dan emas adalah warna inti PT LRT Jakarta. Warna-warna ini digunakan dalam berbagai aplikasi dan selalu mencerminkan identitas perusahaan PT LRT Jakarta itu sendiri.

Dalam logo LRT Jakarta, terdapat 2 (dua) kata kunci yang menyatu sebagai *tagline*, yakni *“moving people”* dan *“connecting communities”*. Tagline ini didesain untuk menarik perhatian dengan ringkas dan memberikan pemahaman mengenai citra perusahaan yang ingin dibangun kepada pelanggan. *Tagline* ini mencakup visi dan misi LRT Jakarta, yakni memobilisasi warga DKI dan menghubungkan seluruh komunitas warga DKI.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Komisaris Utama
Periode Jabatan: 25 Oktober 2019 - RUPS Tahun
2019, Periode Pertama

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Usia 50 tahun

Kelahiran Jakarta, 3 Juni 1969

DOMISILI

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan sebagai Komisaris Perusahaan sejak 25 oktober, melalui Keputusan RUPS PT LRT Jakarta Tahun 2019, Periode I Pengangkatan sebagai Komisaris Utama melalui Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT LRT Jakarta, tanggal 25 oktober 2019.

PENDIDIKAN

Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional (STAN) (1992) serta Magister (S2) Akuntansi Universitas Indonesia (2004).

PENGALAMAN KERJA

Hanief pernah menjabat sebagai pengurus Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), pada 1996 hingga 2015 sebagai Direktur Eksekutif. Sebagai pengurus, ia mampu membangun organisasi profesi, sertifikasi, dan standard setting. Akhirnya, IAI mencapai kemandirian keuangan pada tahun 2000 dan mengembangkan strategi penguatan IAI wilayah. Hanief juga terlibat dalam beberapa kegiatan seperti likuidasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, antara tahun 2005 hingga 2009. Kemudian pada tahun 1999, Hanief terjun dalam kegiatan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4) bergerak di Deputi II bidang Pemantauan Prioritas Pembangunan dan Hubungan Kelembagaan. Selanjutnya, sejak 2015, mengabdikan diri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

RANGKAP JABATAN

Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Persero) (2018-sekarang).

HUBUNGAN AFILIASI

Hanief memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan direktur pengembangan bisnis sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Hanief sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

KEPEMILIKAN SAHAM LRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Hanief tidak memiliki saham Perusahaan.

PROFIL DIREKSI



Direktur Utama
Periode Jabatan: 25 Oktober 2019 - RUPS Tahun
2019, Periode Pertama

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Usia 51 tahun

Kelahiran Padang Panjang, 26 Januari 1968

DOMISILI

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan sebagai Direktur Perusahaan sejak 28 Juli, melalui Keputusan RUPS PT LRT Jakarta Tahun 2019, Periode I Pengangkatan sebagai (Plt) Direktur Utama melalui Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT LRT Jakarta, tanggal 28 Juli 2019. Pengangkatan sebagai Direktur Perusahaan sejak 25 Oktober, melalui Keputusan RUPS PT LRT Jakarta Tahun 2019, Periode I Pengangkatan sebagai Direktur Utama melalui Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT LRT Jakarta, tanggal 25 Oktober 2019.

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Teknik Mesin dari universitas Trisakti Jakarta, Indonesia (1991).

PENGALAMAN KERJA

Memiliki pengalaman yang panjang di PT Kereta Api Indonesia (Persero). Bergabung sebagai Pelaksana Subdit By di Bandung (1994), sempat dipercaya menjadi kepala unit dan kepala seksi di berbagai unit, kemudian dipercaya sebagai Manager Sarana DAOP 8 Surabaya (2009), Senior Manager Sarana Divre III Sumsel (2009), Vice President Tractive Rail Vehicles (2011), Pelaksana Harian EVP Sarana di samping tugas sebagai VP Tractive Rail Vehicles (2012), General Manager Balai Pelatihan Teknik Traksi Yogyakarta (2013), General Manager Balai Pelatihan Teknik Traksi Darman Prasetyo (2014). Direktur Teknik dan Fasilitas Transjakarta (2019).

RANGKAP JABATAN

Tidak memiliki rangkap jabatan.

HUBUNGAN AFILIASI

Wijanarko tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

KEPEMILIKAN SAHAM LRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Wijanarko tidak memiliki saham Perusahaan.

PROFIL DIREKSI



Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis
Periode Jabatan: 25 Oktober 2019 - RUPS Tahun
2019, Periode Pertama

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Usia 50 tahun

Kelahiran Medan, 26 Juni 1969

DOMISILI

Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan sebagai Direktur Perusahaan sejak 25 Oktober, melalui Keputusan RUPS PT LRT Jakarta Tahun 2019, Periode I Pengangkatan sebagai Direktur melalui Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT LRT Jakarta, tanggal 25 oktober 2019.

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) (1998) serta Magister (S2) Manajemen Universitas Bhayangkara Jaya (2002).

PENGALAMAN KERJA

Memiliki pengalaman di berbagai institusi/perusahaan baik Pemerintahan, Swasta/Grup Holding Company, MNC, maupun BUMN/D, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun lamanya. Sebelum bergabung di PT LRT Jakarta beliau adalah Direktur Keuangan dan Administrasi PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (PT. JIP) yang juga merupakan Anak Perusahaan PT Jakpro (Perseroda). Pengalaman lainnya sebagai eksekutif sebelum bergabung adalah sebagai Direktur Keuangan dan IT di PT Rajawali Nurisindo (Anak Perusahaan PT RNI (Persero), dan sebelumnya juga menjabat sebagai Chief Audit Executive (CAE) Perum BULOG dan Kepala Divisi Strategi Bisnis dan Inovasi pada PT RNI (Persero). Pengalaman beliau selain BUMN/D juga pernah bergabung di beberapa grup holding company seperti CT Corpora dan Rajawali Corpora selain beberapa perusahaan Multi National Company (MNC) seperti AXA Services Indonesia dan PT Shields Indonesia dengan posisi strategis.

RANGKAP JABATAN

Tidak memiliki rangkap jabatan.

HUBUNGAN AFILIASI

Rudy tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

KEPEMILIKAN SAHAM LRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Rudy tidak memiliki saham Perusahaan.

PROFIL DIREKSI



Direktur Operasi dan Perawatan
Periode Jabatan: 25 Oktober 2019 - RUPS Tahun
2019, Periode Pertama

DATA PRIBADI

Warga negara Indonesia

Usia 52 tahun

Kelahiran Madiun, 20 Januari 1967

DOMISILI

Depok, Jawa Barat, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

Pengangkatan sebagai Direktur Perusahaan sejak 25 Oktober, melalui Keputusan RUPS PT LRT Jakarta Tahun 2019, Periode I Pengangkatan sebagai Direktur melalui Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT LRT Jakarta, tanggal 25 oktober 2019.

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) (1991) serta Magister (S2) Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung (2001).

PENGALAMAN KERJA

Memiliki pengalaman di berbagai institusi/perusahaan baik Pemerintahan, Swasta/Grup Holding Company, maupun BUMN/D, dengan pengalaman lebih dari 28 tahun lamanya. Pengalaman lainnya sebagai Konsultan kontraktor sebelum bergabung adalah sebagai konsultan di PT MRT Jakarta, Perusahaan lainnya antara lain PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api, PT Indorail dengan posisi strategis.

RANGKAP JABATAN

Tidak memiliki rangkap jabatan.

HUBUNGAN AFILIASI

Indarto tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

KEPEMILIKAN SAHAM LRT JAKARTA

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Indarto tidak memiliki saham Perusahaan.

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Kesadaran akan kebutuhan intergrasi antar moda transportasi publik, mendorong Perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi dan keandalan Sumber Daya Manusia sebagai faktor kunci dalam pelayanan transportasi publik yang diberikan kepada masyarakat.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia 2019

Perseroan menerapkan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan di dalam Perusahaan. Selain program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang terus dilakukan secara konsisten, Perusahaan juga telah merealisasikan program kerja bidang SDM pada tahun 2019, antara lain:

- Penerapan absensi program Talenta,
- Pembaharuan data pegawai melalui HRIS,
- Penyempurnaan data kepegawaian,
- Remunerasi berdasarkan Kinerja/Disiplin,
- Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (model kompetensi, kamus dan matrik kompetensi),
- Penyelesaian/revisi SK Direksi terkait Sumber Daya Manusia, dan
- Program kerja lain terkait peningkatan kompetensi serta kesejahteraan pegawai.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM

Perusahaan telah merancang rencana program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, baik *soft-skill* maupun *hard-skill* yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Program Pelatihan dan pengembangan SDM yang diberikan meliputi kompetensi spesifik dalam bidang transportasi berbasis rel maupun kompetensi lain terkait keamanan, pelayanan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Rekrutmen SDM

Perusahaan menerapkan beberapa mekanisme rekrutmen pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di masing-masing level organisasi. Mekanisme rekrutmen SDM di Perusahaan, antara lain melalui:

1. Jalur Internal Sumber daya berasal dari internal Perusahaan (PKWT).
2. Jalur Eksternal/Reguler Sumber daya berasal dari eksternal Perusahaan, info lowongan kerja melalui website.
3. Jalur Profesional, untuk posisi Managerial Level.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan perekrutan pegawai sebanyak 278 orang pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis dan wilayah layanan Perusahaan.

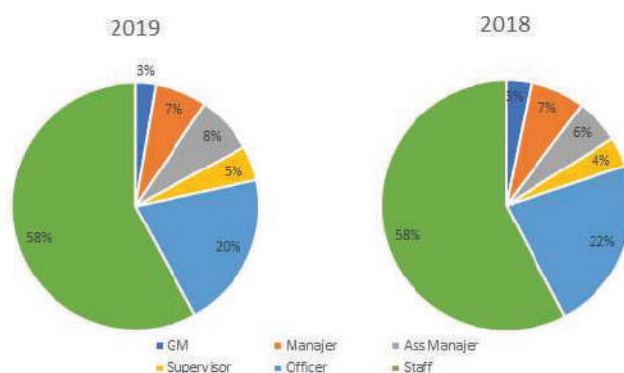
Demografi Karyawan

Per 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 272 orang, mengalami peningkatan sebanyak 113 orang atau 58% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2018 yang sebanyak 159 orang. Adanya kenaikan ini disebabkan penambahan stasiun yang dioperasikan di tahun 2019.

Profil demografi karyawan Perusahaan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi (orang)

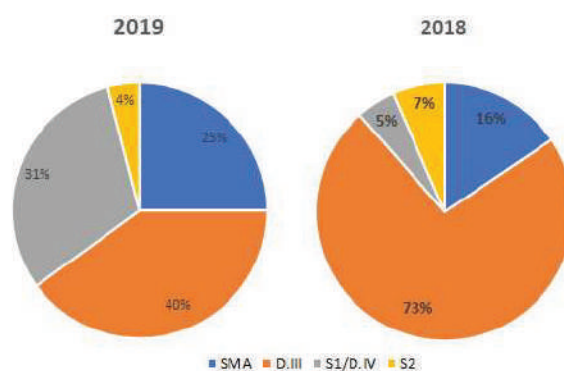
Jabatan	2019				2018			
	L	P	Jumlah Total	Percentage	L	P	Jumlah Total	Percentage
GM	7	-	7	3%	5	0	5	3%
Manajer	15	3	19	7%	10	1	11	7%
Ass Manajer	19	1	20	7%	8	1	9	6%
Supervisor	11	1	14	5%	5	1	6	4%
Officer	42	12	54	20%	25	10	35	22%
Staff	92	61	158	58%	62	28	90	58%
Total Karyawan	186	78	272	100%	115	41	156	100%



Berdasarkan level organisasi, komposisi jumlah karyawan didominasi oleh karyawan petugas layanan stasiun, Petugas pemeriksa prasarana, pemeriksa sarana dan awak sarana perkeretaapian.

Demografi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

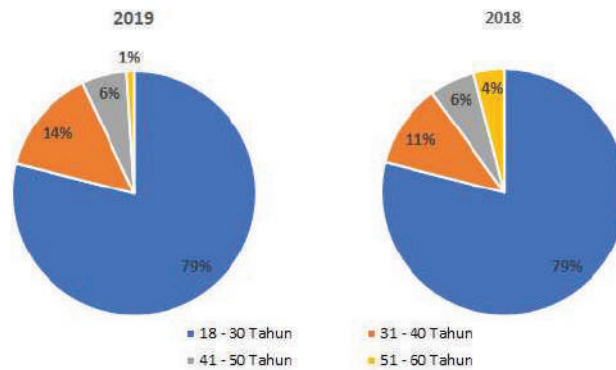
Tingkat Pendidikan	2019				2018			
	L	P	Jumlah Total	Percentage	L	P	Jumlah Total	Percentage
SMA	38	31	69	25%	11	8	19	16%
D.III	78	32	110	40%	64	25	89	73%
S1/D.IV	66	17	83	31%	64	16	6	5%
S2	10	0	10	4%	8	0	8	7%
Total Karyawan	192	80	272	100%	147	49	122	100%



Di tahun 2019, sebanyak 45% karyawan LRT Jakarta berlatar belakang D.III. Hal ini sejalan dengan system rekrutmen untuk level jabatan operasi di lapangan yang mempersyaratkan latar belakang D.III.

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Usia	2019				2018			
	L	P	Jumlah Total	Percentage	L	P	Jumlah Total	Percentage
18 - 30 Tahun	137	77	214	79%	86	39	125	79%
31 - 40 Tahun	33	4	37	14%	15	2	17	11%
41 - 50 Tahun	17	-	17	6%	10	-	10	6%
> 51 Tahun	4	0	4	1%	7	-	7	4%
Jumlah	191	81	272	100%	118	41	159	100%



Di tahun 2019 sebanyak 78% karyawan LRT Jakarta berumur 18-30 tahun, sedangkan 14% lainnya berusia 31-40 tahun. Rentang usia tersebut sejalan dengan kebutuhan LRT Jakarta atas karyawan yang memiliki fungsi operasi di lapangan.

Program Pelatihan Pegawai 2019

Untuk mempersiapkan kualitas yang maksimal di bidang Sumber Daya Manusia, PT LRT Jakarta telah melakukan berbagai pelatihan dan sertifikasi, diantaranya adalah:

No.	Judul Pelatihan	Peserta	Pelaksanaan
1	Diklat Orientasi Dasar Perkeretaapian	Staf Perawatan & Pemeriksa Prasarana Staf Perawatan & Pemeriksa Sarana	24 Januari 2019
2	Pengujian dan sertifikasi keahlian tenaga pemeriksa dan perawat Sarana oleh Kementerian Perkeretaapian	Staf Perawatan & Pemeriksa Sarana	28 Februari 2019
3	Sertifikasi operator peralatan khusus <i>Mobile Crane</i> oleh Kementerian Tenaga kerja	Staf Perawatan Sarana	12 Juni 2019
4	Sertifikasi operator peralatan khusus Lifting Jack oleh Kementerian Tenaga kerja	Staf Perawat Sarana	20 Juni 2019
5	Sertifikasi operator peralatan khusus Forklift oleh Kementerian Tenaga kerja	Staf Perawatan & Pemeriksa Sarana	27 Juni 2019
6	Sertifikasi operator peralatan khusus Mesin Produksi oleh Kementerian Tenaga kerja	Staf Perawatan & Pemeriksa Sarana	25 Juli 2019

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut, Modal Ditempatkan dan Disetor penuh oleh Para Pemegang Saham adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Tabel. 3

Komposisi Kepemilikan Saham PT LRT Jakarta

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan	Nilai
	Lembar	%	Rp
PT JakPro	148.500	99,0	148.500.000.000
PT JIP	1.500	1,0	1.500.000.000
Total Modal	150.000	100,0	150.000.000.000

Pada saat ini Perusahaan telah menerima setoran modal dari Para Pemegang Saham.

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk senantiasa menjalankan kinerja secara transparan dan akuntabel, Perusahaan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui <http://lrtjakarta.co.id>.

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Uraian	Ketersediaan	Keterangan
Struktur Organisasi Perusahaan	V	Tercantum di kanal Struktur Organisasi
Isi Kode Etik	X	Belum tercantum di web
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	X	Belum tercantum di web
Laporan keuangan tahunan	X	Belum tercantum di web
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	V	Tercantum di kanal Struktur Organisasi
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	X	Belum tercantum di web

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen



“

Membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang LRTJ.

“

TINJAUAN KESIAPAN OPERASI

Kesiapan Sumber Daya Manusia

Perusahaan senantiasa berusaha mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah sebagai peyelenggara sarana perkeretaapian LRT Jakarta. Selama tahun 2019, kesiapan sumber daya manusia PT LRT Jakarta menjadi salah satu fokus utama yang terkait langsung dengan operasional. Serangkaian Pendidikan dan Latihan (“Diklat”) bersertifikasi telah diikuti oleh SDM PT LRT Jakarta, diantaranya :

a. SDM Awak Sarana Perkeretaapian (“ASP”)



Sepanjang tahun 2019, total sejumlah 37 orang SDM ASP telah lulus sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian.

Selama tahun 2019 SDM ASP telah dilibatkan secara langsung pada beberapa kegiatan strategis yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi ASP, antara lain pengujian dinamis internal Sarana LRV dengan Hyundai Rotem yang dilanjutkan dengan pengujian dinamis Sarana LRV dengan Balai Pengujian Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (September 2019), Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat, guna melatih kemampuan untuk mengarahkan, berkoordinasi dan mengendalikan aktivitas darurat menggunakan Sistem Komando insiden dan puncaknya Pelaksanaan operasi komersial LRT Jakarta 1 Desember 2019.

b. SDM Operation Control Center (“OCC”)

SDM OCC terlibat secara intens dalam Uji Coba terbatas sampai dengan pelaksanaan operasi komersial LRT Jakarta. Program kerja terkait tugas pokok fungsi OCC yang dilakukan sepanjang tahun 2019 antara lain mendapatkan persetujuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) dan persetujuan semboyan kereta api.

Guna meningkatkan kompetensi, SDM OCC juga telah diberikan bimbingan teknis terkait manajemen resiko perkeretaapian serta pelatihan terkait persinyalan, SCADA dan sistem OCC.

c. SDM Pelayanan

Kesiapan SDM Pelayanan melakukan kegiatan/program kerja sebagai berikut:

Pelatihan dasar pengetahuan kereta api oleh tim staff ahli yang dipimpin oleh Bapak Hermanto, yang diikuti oleh *Station Head*, *Service Leader* dan *passenger service agent*. Jumlah peserta sebanyak 70 orang pada tanggal 1 April 2019.



Pelatihan disabilitas oleh GAUN, Sebagai bentuk layanan yang professional, maka LRT Jakarta memandang perlu untuk memberikan keseimbangan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat terkhusus kepada para sahabat disabilitas. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh staff pelayanan yaitu *Station Head*, *Service Leader* juga *Passenger Service Agent* pada tanggal 15-18 April 2019.



Pelatihan P3K oleh *Safety Code*, Sebagai bentuk tanggung jawab layanan terhadap penumpang, maka PT LRT Jakarta melalui Departemen Training menyelenggarakan pelatihan serta pembentukan tim P3K untuk setiap stasiun. Dimana pelatihan ini bekerja sama dengan perusahaan *Safety Code* pada tanggal 13-15 Mei 2019.



Pelatihan *bomb thread* (ancaman bom), Pelatihan ini adalah pengetahuan dasar terkait ancaman bom dan diberikan oleh supervisor keamanan kepada Seluruh *Station Head*, *Service Leader* dan *Passenger Service Agent* pada tanggal 29 Mei 2019.



On the Job Training, Station Head dan *service leader* melakukan *cross training program* selama 3 hari di Fairmont Hotel untuk lebih menguasai terkait mekanisme hospitality atau keramahtamahan. Menangani keluhan dan saran tamu secara efektif dan efisien. Pada tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 2019.



Service leader batch kedua melakukan *cross training* program ke Le Meridien Hotel dengan tujuan untuk mempelajari mekanisme keramah – tamahan serta melakukan penanganan terkait keluhan dan saran dari tamu. Pada tanggal 10 sampai dengan 14 juni 2019.



Pelatihan *First Aid Training* untuk *passenger service agent*, Pelatihan ini dilakukan untuk membentuk tim pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan pada saat operasional. Pada tanggal 13-15 Mei 2019.



Pelatihan *Emergency Response Team (ERP)* dari Training Departemen pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2019.



SDM Pelayanan melakukan dan menerima kunjungan diantaranya:

Internship Program Team Operasi dan Pelayanan LRT Jakarta berada di Command Center Transjakarta. Berjumlah 18 orang yang terdiri dari Pelayanan 15 orang dan OCC 3 orang pada tanggal 9 Januari 2019.



Workshop bersama Blogger dan lomba menulis artikel LRT yang merupakan rangkaian program yang berbentuk konten tulisan berisi tentang opini, gagasan atau fakta yang sifatnya membujuk, mendidik, meyakinkan, ataupun menghibur pada tanggal 10 Januari 2019



Sosialisasi LRT Jakarta kepada Komunitas Penyandang Disabilitas 'Jakarta Great Barrier Free' pada tanggal 27 April 2019.



d. SDM Perawatan

Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Bekasi. Sedangkan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi tenaga pemeriksa dan perawat sarana di Kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI), Madiun selama periode 28 Januari 2019 sampai 14 Februari 2019 diikuti oleh 24 orang, yang dilanjutkan dengan pengujian dan sertifikasi keahlian tenaga Pemeriksa dan Perawat Sarana oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Kementerian Perhubungan.

Serangkaian kegiatan besar yang melibatkan secara langsung SDM pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sepanjang tahun 2019 antara lain:

- Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat, guna melatih kemampuan untuk mengarahkan, berkoordinasi dan mengendalikan aktivitas darurat menggunakan Sistem Komando insiden



- Pengujian prasarana jalur section 5B, stasiun mainline dan fasilitas operasi oleh balai pengujian Kementerian Perhubungan,



- Kegiatan Trial Run, yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan sistem perkeretaapian LRV dan dilaksanakan dibawah koordinasi PT Jakarta Propertindo (Persero).



- Kegiatan uji publik LRT Jakarta, yang bertujuan untuk mensosialisasikan sistim transportasi perkeretaapian PT LRT Jakarta kepada masyarakat,
- Pelaksanaan uji berkala pada 4 Trainset LRV yang telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Sertifikat Uji Pertama oleh Kementerian Perhubungan.



e. Kunjungan Kerja & *Study banding*

Dalam mempersiapkan SDM LRT Jakarta, Manajemen Perusahaan menginisiasi dilakukannya Studi banding untuk mendapatkan masukan *industry best practices*, khususnya ke beberapa operator moda transportasi publik serta lembaga/perusahaan yang memiliki bentuk layanan serupa yang bisa dijadikan perbandingan.

Studi banding ini diikuti oleh hampir seluruh Departemen sesuai kebutuhan materi pengetahuan, dengan pelaksanaan sepanjang tahun 2019 antara lain:

- PT Transportasi Jakarta, Januari 2019



- PT Railink, Januari 2019



- PT Angkasa Pura II, Januari 2019



- PT KCI, Januari 2019



f. Uji coba Pengoperasian Terbatas LRT Jakarta

Uji coba pengoperasian terbatas LRT Jakarta sebagai pelaksana Uji operasi, dapat menjadi pelatihan dan evaluasi kepada SDM LRT Jakarta. Pengoperasian dan kegiatan administrasi dinas khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pengguna LRT Jakarta. Tujuan pelaksanaan tersebut adalah untuk menguji kelaikan teknis terhadap integrasi prasarana dan sarana LRT Jakarta, serta dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pengoperasian dan pelayanan LRT Jakarta.

Uji operasi LRT Jakarta berjalan lancar dengan pencapaian *zero accident* dan *zero mistake* saat beroperasi. Dari hasil evaluasi atas survei yang dilakukan, didapatkan bahwa masyarakat berharap pengoperasian komersial LRT Jakarta dapat segera dilakukan.

Kesiapan Legalitas, Perizinan, dan Regulasi lainnya

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT LRT Jakarta, selalu memastikan agar terpenuhinya aspek legalitas dan perizinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

a. Perizinan dan Legalitas

Perusahaan didesain bertugas sebagai Penyelenggara Sarana atas Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta. Selain legalitas korporasi yang telah dimiliki, terkait tugas sebagai Penyelenggara Sarana, perizinan yang telah dimiliki di tahun 2019 adalah:

- Izin Operasi Sarana telah diterbitkan dengan nomor 1540 Tahun 2019 pada tanggal 25 Oktober 2019 masa berlaku 5 tahun dengan pemegang izin adalah PT LRT Jakarta.



- Izin Operasi Prasarana telah diterbitkan dengan nomor 1607 Tahun 2019 pada tanggal 15 November 2019 sesuai dengan perjanjian penyelenggaraan prasarana dengan pemegang izin adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda).



- Izin Pembangunan telah diterbitkan pada tanggal 15 November 2019 masa berlaku 5 tahun dengan pemegang izin adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda).



- Izin Mendirikan Bangunan:



- a. Stasiun Pegangsaan Dua, telah diterbitkan dengan nomor 32/C/37.a/31.72.06.1002.06.008.C.1.B/1/-1.785.51/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019.
- b. Stasiun Boulevard Utara, telah diterbitkan dengan nomor 26/C/37.a/31.72.06.1001.05.010.H.4.a.b/1/-1.785.51/2019 pada tanggal 19 Agustus 2019.
- c. Stasiun Boulevard Selatan, telah diterbitkan dengan nomor 27/C/37.a/31.72.06.1001.01.005.K.2/1/1.785.51/2019 pada tanggal 19 Agustus 2019.
- d. Stasiun Pulomas, telah diterbitkan dengan nomor 28/C/37.a/31.75.02.1005.03.007.R.7.a.b/1/-1.785.51/2019 pada tanggal 19 Agustus 2019.
- e. Stasiun Equestrian, telah diterbitkan dengan nomor 30/C/37.a/31.75.02.1006.03.028.S.6.a.b/1/-1.785.51/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019.
- f. Stasiun Velodrome, telah diterbitkan dengan nomor 29/C/37.a/31.75.02.1005.01.027.H.7.b /1/-1.785.51/2019 pada tanggal 20 Agustus 2019.

b. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan persyaratan layanan kepada publik yang harus dicapai oleh LRT Jakarta dalam pengoperasian sarana dan prasarana perkeretaapiannya. SPM ini ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri (PM) No.48 Tahun.

Ramp Check (penilaian terhadap kesiapan pengoperasian sarana dan prasarana perkeretaapian) terhadap pencapaian kriteria pada SPM LRT Jakarta dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan pencapaian nilai 97.15%



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

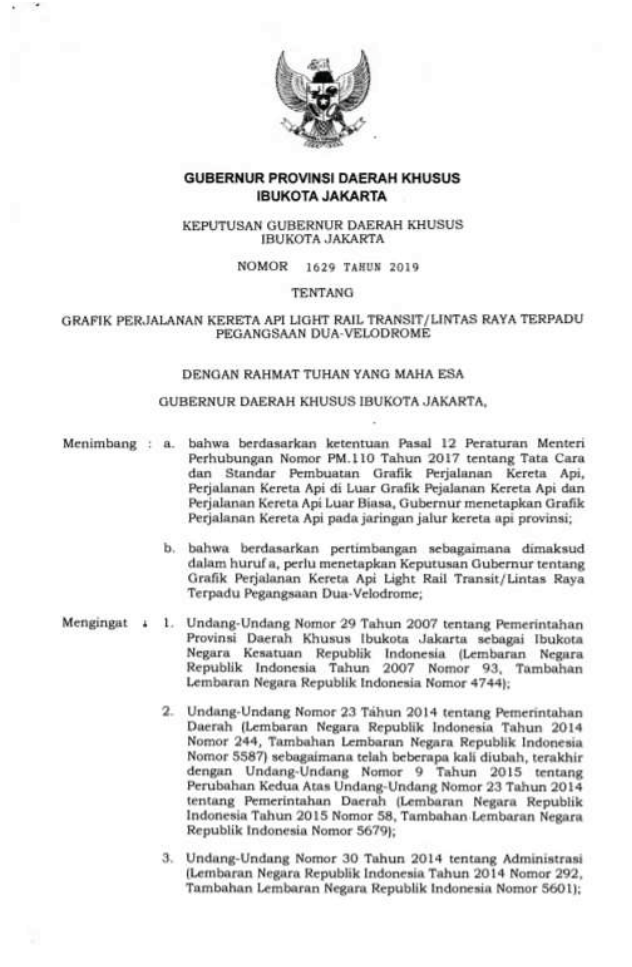
**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM. 48 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API**

c. Grafik Perjalanan Kereta (GAPEKA)

Pada tanggal 20 November 2019, Perusahaan telah mendapatkan Grafik Perjalanan Kereta yang disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor 1629 Tahun 2019.



d. Standar Operating Prosedure (“SOP”)

Persetujuan SOP dilakukan baik untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam penyelenggaraan perkeretaapian maupun untuk mempersiapkan diri atas rencana sertifikasi dan implementasi ISO. Persetujuan SOP yang telah dilakukan selama tahun 2019, antara lain:

- Persetujuan SOP Alur Dinasan ASP
- Persetujuan SOP Tunjuk Sebut Semboyan ASP
- Persetujuan SOP Pelayanan
- Persetujuan SOP Perawatan dan Pemeriksaan Fasilitas Operasi

- Persetujuan SOP Pengoperasian Fasilitas Operasi
- Persetujuan SOP Perawatan dan Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian LRT Jakarta



- Persetujuan SOP Pengoperasian Fasilitas Stasiun
- Persetujuan SOP Perawatan dan Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian
- Persetujuan SOP Keselamatan Perkeretaapian dan Kesehatan Keselamatan Kerja (SOP KPK3)

e. Penugasan Pelayanan Publik (PSO) dan Penetapan Tarif Layanan

Pada bulan Desember 2019, telah ditetapkan tarif tetap LRT Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp5.000 (yang belum termasuk tarif integrasi dengan layanan BRT Transjakarta).

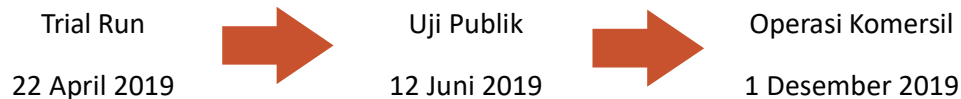
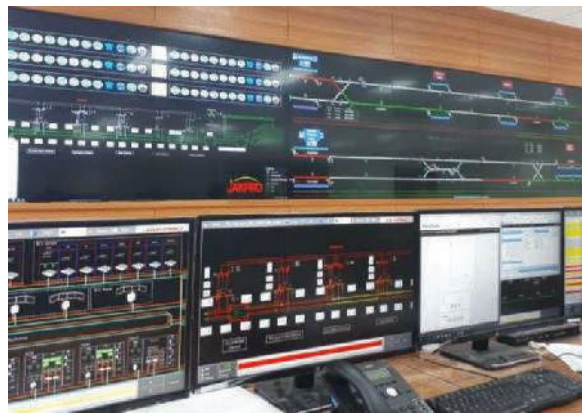


Kesiapan Prasarana dan Sarana LRT Jakarta

Kesiapan operasi penyelenggaraan Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta, tidak terlepas dari kesiapan fisik Prasarana dan Sarana LRT Jakarta.

a. Kesiapan Prasarana : Jalur dan Bangunan, serta Fasilitas Operasi

Sebelum dilakukannya uji publik (12 Juni 2019) dan operasi secara komersial (1 Desember 2019) maka kontraktor bersama dengan PT LRT Jakarta melakukan *Trial Run* (TRU) pada tanggal 22 April 2019 guna memastikan segala aspek kesiapan baik dari sisi operasional maupun non operasional telah siap. Divisi Prasarana dalam hal ini menjadi penanggungjawab dari PT LRT Jakarta untuk melakukan uji TRU bersama dengan kontraktor.



Adapun kegiatan yang dilakukan selama uji TRU dari sebelum dimulainya operasional sampai dengan selesai adalah sebagai berikut:



b. Kesiapan Sarana Perkeretaapian *Light Rail Vehicle (LRV)*

Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Uji Berkala Sarana LRV dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian dan Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Uji Pertama dilakukan pada bulan Juni dan november 2018, sedangkan Uji Berkala dilakukan pada tanggal 10-12 September dan pada tanggal 3-5 Desember 2019.



Uji Pertama dilakukan pada Bulan Juni dan November 2018



Uji Berkala dilakukan pada 3 s/d 5 Desember 2019

PEMELIHARAAN SARANA

Sesuai dengan Standard Prosedur Operasional (SOP)/Manual yang telah disahkan oleh oleh DJKA. Pemeliharaan sarana terdiri dari Pemeriksaan Harian, Perawatan Mingguan, Perawatan 4 Bulanan, Perawatan 4 Tahunan dan Perawatan 8 Tahunan.

FASILITAS PERAWATAN SARANA

2

AUTOMATIC TRAIN WASHING PLANT

- Automatic Train Washing Plant didesain untuk pencucian LRV di track dengan kecepatan maksimum 5 km/jam.
- Pencucian LRV dilakukan secara otomatis oleh sistem. Tersedia pilihan pencucian LRV dengan beberapa mode operasi.

SHUNTING VEHICLE

- Shunting Vehicle adalah kendaraan yang dapat beroperasi diatas rel dan jalan darat.
- Berfungsi untuk menggantikan lokomotif langsir yang digunakan di dalam area depo untuk membantu perawatan LRV.

3

FASILITAS PERAWATAN SARANA

STINGER SYSTEM

Stinger adalah catu daya eksternal untuk LRV, diinstal di area perawatan dan terpisah dari catu daya utama (750 VDC).

Sistem mencatu kebutuhan daya untuk operasi sistem on-board dan untuk bergerak perlahan diatas rel dalam jarak terbatas.

SAND FILLING VEHICLE

Sistem pemasir digunakan pada LRV untuk menambah adhesi antara roda dan rel. Proses pengisian pasir pada sand box menggunakan sand filling vehicle.

UNDERFLOOR WHEEL LATHE

- Proses re-profiling roda dengan menggunakan mesin bubut jenis underfloor tanpa melepas wheelset dari bogie, mengurangi waktu perawatan



6

Bogie Shunter



8

Kesiapan Sistem Ticketing

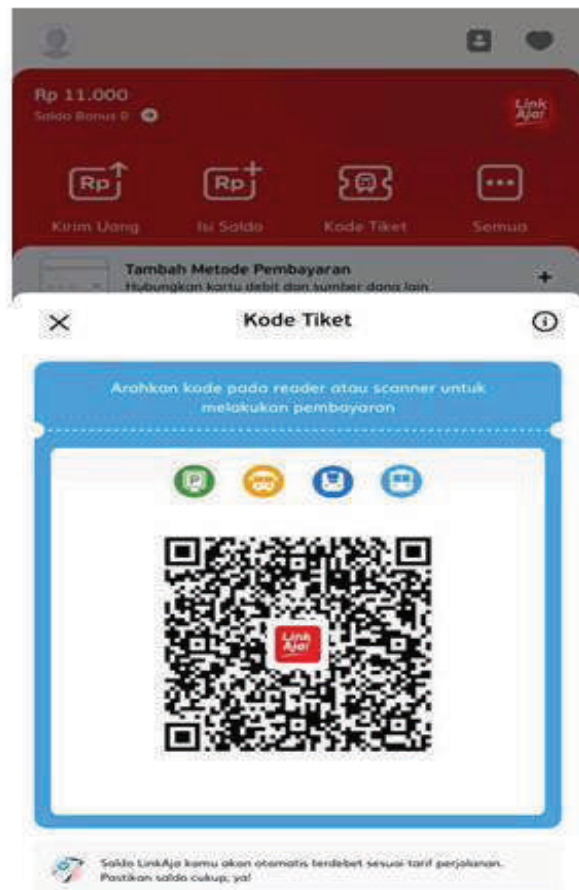
PENGEMBANGAN QR CODE TIKETING



Pembayaran dengan QR Reader

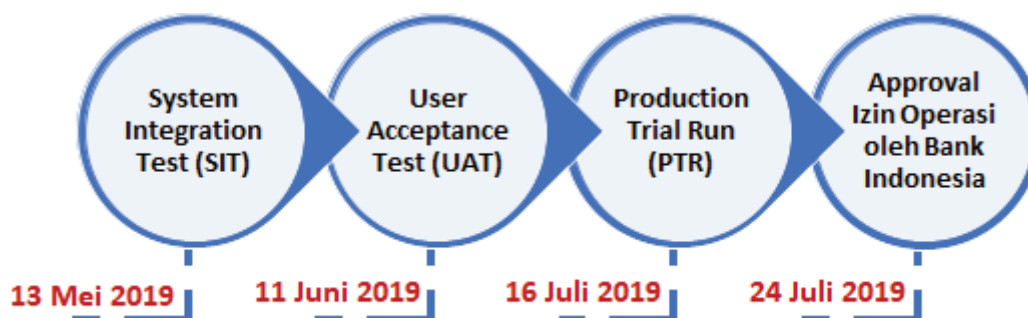
Dalam rangka penerapan sistem ticketing cashless, saat ini PT LRT Jakarta sedang mengembangkan sistem ticketing berbasis QR Code dimana penumpang LRT Jakarta dapat menggunakan Mobile Phone saat TAP IN di pintu Gate Stasiun. Pengembangan QR Code ticketing ini bekerjasama dengan fintech mobile payment dimana pembelian tiket LRT Jakarta akan menggunakan Apps dari fintech mobile payment tersebut yang akan men-generate QR Code.

Saat ini progress dari pengembangan sistem ticketing QR Code ini telah mencapai tahapan instalasi perangkat dimana ditargetkan Juni 2020 akan segera Go Live di Stasiun LRT Jakarta.



Kesiapan Sistem Ticketing

PELAKSANAAN PENGUJIAN INTEROPERABILITAS KARTU UANG ELEKTRONIK MODA TRANSPORTASI



Proses Perizinan Penggunaan Kartu Uang Elektronik (KUE) di LRT Jakarta

PT LRT Jakarta dalam mengimplementasikan penggunaan Kartu Uang Elektronik (KUE) di Stasiun LRT Jakarta tetap berpedoman pada aturan Bank Indonesia yang mengharuskan diadakan proses pengujian interoperabilitas KUE. Divisi Prasarana dalam memulai proses tersebut berkoordinasi dengan PT. Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) untuk mendapatkan kartu *Security Access Module* (SAM) sejumlah 209 unit yang akan dipasang pada perangkat ticketing.



User Acceptance Test (UAT) bersama BI
Dalam proses pengujian *User Acceptance Test* (UAT) pada tanggal 11 Juni 2019, LRT Jakarta dan Bank yang bekerjasama, tetap didampingi Pihak Bank Indonesia sebagai witness.

Pada tahapan *Production Trial Run* (PTR) ditanggal 16 Juli 2019, PT LRT Jakarta juga bekerjasama dengan *Payment Gateway* (PG) sebagai Lembaga dibawah pengawasan Bank Indonesia yang melaksanakan *settlement* transaksi kartu uang elektronik LRT kepada masing-masing Bank.



Production Trial Run (PTR) bersama PTEN

Seluruh outstanding pada saat pengujian dilaporkan PT LRT Jakarta kepada Bank Indonesia dalam rapat bersama pada tanggal 22 Juli 2019 dan Bank Indonesia mengeluarkan izin operasi KUE pada tanggal 24 Juli 2019 kepada LRT Jakarta.

Kesiapan Sistem Ticketing

INTEGRASI FISIK & TIKETING PT LRT JAKARTA DAN TRANSJAKARTA



Skybridge LRT Jakarta dan Transjakarta

PT LRT Jakarta bersama dengan PT Transportasi Jakarta mendukung program integrasi antar moda transportasi di Jakarta dengan membangun Skybridge yang menghubungkan St. Velodrome LRT dan Halte Pemuda Rawamangun. Selain integrasi fisik berupa skybridge, di Stasiun Velodrome LRT Jakarta juga dipasang Gate Integrasi Ticketing yang digunakan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran kedua moda transportasi. Dengan adanya Gate Integrasi tersebut penumpang LRT yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan Bus Transjakarta tidak perlu melakukan TAP IN di halte transjakarta, karena sistem ticketing yang diberlakukan pada Gate Integrasi adalah *seamless*, yaitu hanya perlu

1 kali Tap In. Skybridge dan Gate Integrasi LRT Jakarta & Transjakarta telah diresmikan dan digunakan untuk publik mulai tanggal 26 Juli 2019, dimana rata-rata penumpang yang melalui gate integrasi ini ± 1500 orang.



Peresmian Skybridge LRTJ & Transjakarta

Fasilitas Free Wi-Fi Stasiun LRT

AKSES INTERNET GRATIS DI STASIUN LRT



Informasi Free Wi-Fi Stasiun LRT

Untuk memenuhi unsur kenyamanan sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu Dan Lintas Raya Terpadu, maka di seluruh stasiun terpasang jaringan internet gratis yang dapat di akses oleh seluruh penumpang.

Fasilitas internet gratis di Stasiun LRT Jakarta hanya aktif selama waktu operasional LRT Jakarta yakni pada pukul 05:30 WIB sampai dengan 23:00 WIB setiap harinya.

Penumpang dapat menikmati fasilitas internet gratis ini di seluruh area Stasiun, yakni area berbayar atau tidak berbayar maupun di lantai 1 dan lantai 2 Stasiun. Waktu akses penumpang yang diberikan adalah selama 2 Jam.



Perangkat Firewall Jaringan Internet

Fasilitas internet ini juga di lengkapi dengan sistem pengamanan Firewall yang berteknologi tinggi sehingga akses internet tetap dibatasi untuk alamat *website* yang tidak sesuai dengan aturan Internet Sehat & Aman (INSAN) yang tertuang di PERMEN KOMINFO No 19 Thn 2014.



Antenna Wi-Fi yang terpasang di Stasiun

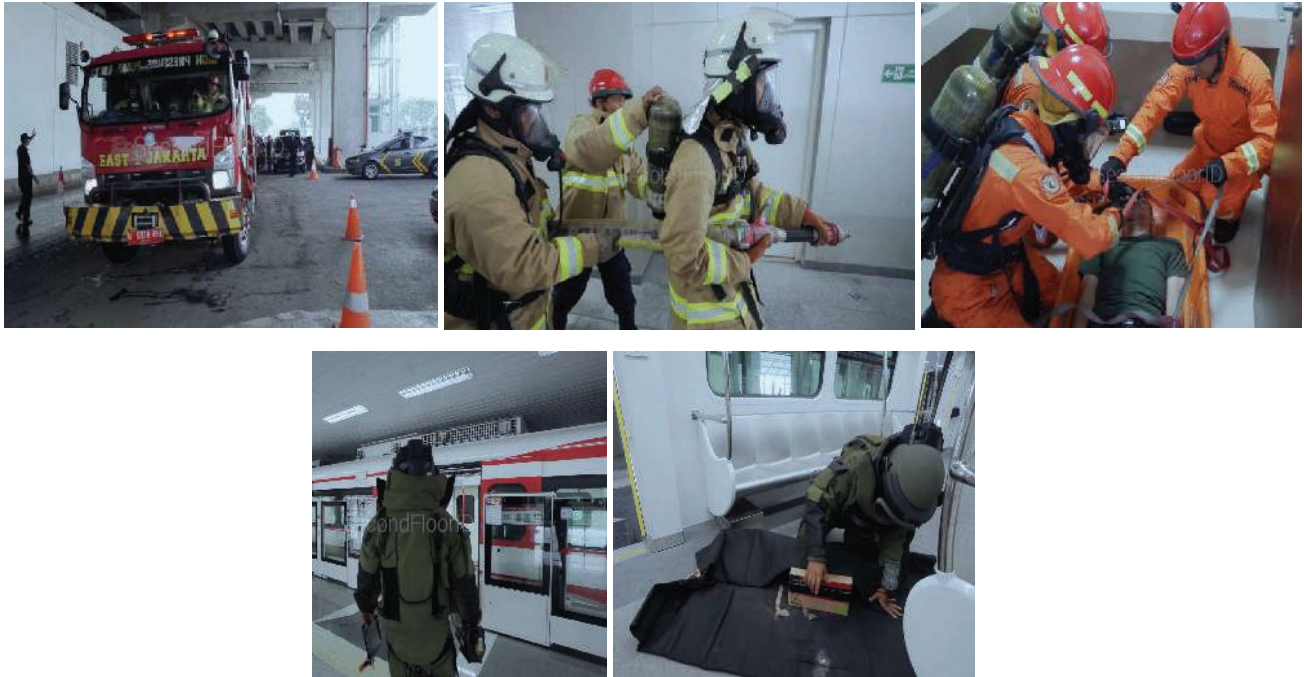
Untuk kedepannya fasilitas internet ini akan dimanfaatkan sebagai salah satu media Non-Fare Box yang akan bekerjasama dengan tenant-tenant LRT Jakarta dan juga dapat dimanfaatkan sebagai media advertisement.

Komitmen terhadap K3 (Safety, Health & Environment / SHE)

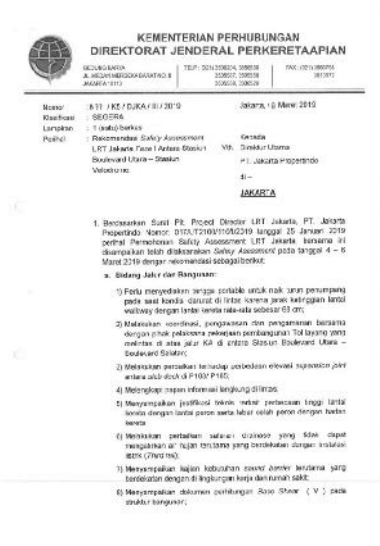
Sebagai konsekuensi Perusahaan yang bergerak di industri pelayanan umum (transportasi massal) dan merupakan industri yang ter-regulasi maka peranan SHE cukup krusial untuk memastikan rencana kebijakan dan implementasi operasional perusahaan memenuhi kriteria keamanan dan mampu memitigasi segala potensi resiko.

Beberapa aktivitas penting yang telah selesai dilakukan selama tahun 2019, secara garis besar:

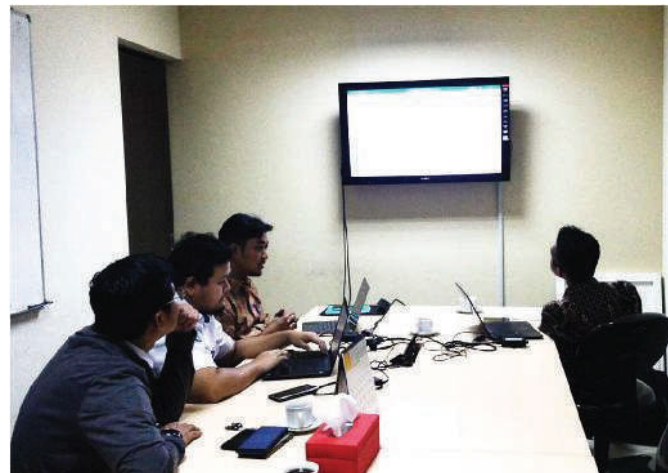
- Pelaksanaan simulasi tanggap darurat, yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Februari 2019. Bertempat di Stasiun Velodorme, dengan melibatkan berbagai instansi. Diantaranya Kepolisian – Pamobvit, Medical Services, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Timur, dan Brimob Gegana Polda Metro Jaya.



- **Safety Assessment** oleh DJKA (Direktorat Jenderal Kereta Api) Kementerian Perhubungan RI dilakukan guna memenuhi ketentuan persyaratan sebelum pengoperasian LRT Fase 1 Antara St. Boulevard Utara – St. Velodrome.



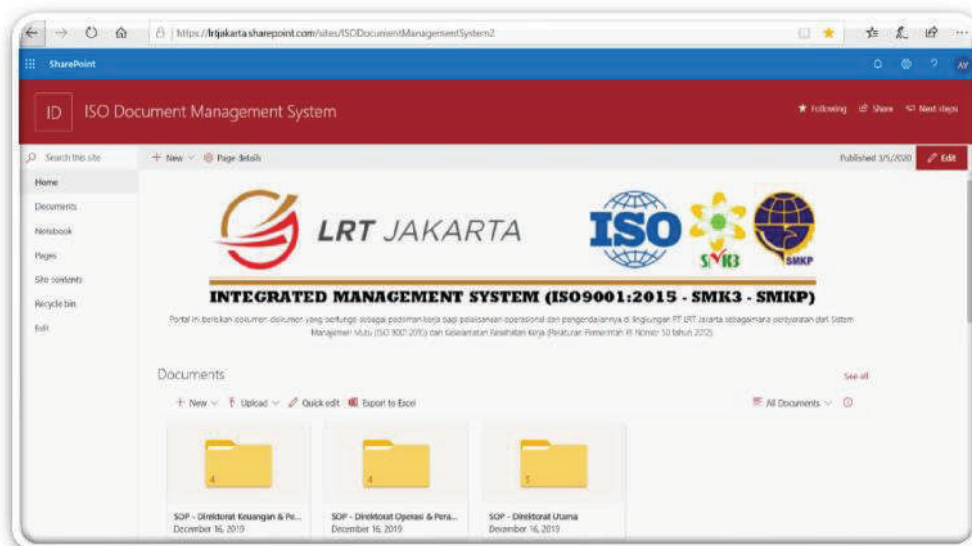
- **Audit Pembahasan rencana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian PT LRT Jakarta** merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2019.



- Pengembangan dan penerapan sistem yang terintegrasi antara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) berdasarkan Permen 69 Tahun 2018 serta Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015 secara efisien dan efektif.



- Pengembangan dan penerapan sistem e-Dokumen ISO9001:2015–SMK3–SMKP yang terintegrasi yang dapat diakses melalui perangkat PC (Personal Computer) dan Smartphone guna kemudahan karyawan PT LRT Jakarta dalam mengakses dokumen-dokumen terkait.



Operasi Komersial LRT Jakarta

PT LRT Jakarta resmi beroperasi secara komersial pada 1 Desember 2019, setelah sebelumnya melakukan Uji Publik sejak bulan Juni 2019 yang telah melayani lebih dari satu juta penumpang.

Untuk menandakan hari bersejarah ini seluruh jajaran Direksi dan Management LRT Jakarta berkumpul di Stasiun Pegangsaan Dua sebelum kereta pertama beroperasi dari pukul 04.00 pagi untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Mengawali Operasi komersial ini, Direktur Utama PT LRT Jakarta memimpin doa bersama sekaligus melakukan prosesi pemotongan tumpeng untuk memohon kelancaran dan kesuksesan LRT Jakarta kepada Allah dalam mengemban tugas sebagai operator moda transportasi publik yang melayani warga DKI Jakarta.

Pelepasan kereta pertama ini juga dihadiri oleh berbagai media yang meliput hari pertama operasi komersial LRT Jakarta. Adapun para pelanggan atau Sahabat LRTJ sudah dapat melakukan pembayaran secara tunai dan nontunai dengan menggunakan mesin tiket otomatis maupun Kartu Uang Elektronik (KUE) yang diterbitkan oleh Bank DKI, Mandiri, BNI, BRI dan BCA.



Keputusan Perusahaan

Untuk mendukung kebutuhan operasional sebagai perusahaan yang bergerak dalam usaha transportasi umum, Perusahaan juga telah menetapkan beberapa keputusan, antara lain:

- SK Direksi No. 001/SPR/111/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SPR/111/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Perubahan Kebijakan Matriks Kewenangan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/SPR/111/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)
- SK Direksi No. 001/SDM/111/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal Komponen Upah beserta Struktur dan Skala Gaji PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SDM/111/V/2019 tanggal 15 Mei 2018 perihal Pengaturan Cuti Bersama Tahun 2019 PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/SDM/111/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyesuaian Ketentuan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rawat Jalan bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SDM/111/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 perihal Pemberian Alat Kerja PC dan Laptop bagi Karyawan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SDM/111/IX/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Perubahan Struktur organisasi PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SDM/111/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Pembentukan Jadwal piket Sabtu Minggu PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/SDM/111/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*)
- SK Direksi No. 003/SDM/111/X/2019 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Perubahan atas Peraturan Direksi No.006/SDM/111/IX/2018 mengenai struktur dan skala gaji PT LRT Jakarta

- SK Direksi No. 001/SDM/111/XI/2019 tanggal 1 November 2019 perihal Ketentuan Rangkap Jabatan bagi Karyawan dengan Level Kepala Departemen/Manager dan Kepala Divisi/General Manager
- SK Direksi No. 002/SDM/111/XI/2019 tanggal 1 November 2019 perihal Penggunaan Pakaian Di Lingkungan Kerja PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SDM/111/XII/2019 tanggal 12 Desember 2018 perihal Penetapan Tanggal Pembayaran Seluruh Komponen Gaji Karyawan
- SK Direksi No. 001/OPL/111/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Standar operasional Prosedur Pengoperasian Kereta Api Light rail Transit (LRT) Jakarta
- SK Direksi No. 001/HSE/111/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Kebijakan Keselamatan dan Program Kerja Keselamatan
- SK Direksi No. 001/HSE/111/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Penetapan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat KPK3 (Keselamatan Perkeretaapian dan Keselamatan Kesehatan Kerja) PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 002/HSE/111/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Penetapan Struktur Organisasi P2KPK3 (Panitia Pembina Keselamatan Perkeretaapian dan Keselamatan Kesehatan Kerja) PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Aditia Kesume Negara Dalimunthe
- SK Direksi No. 002/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Keputusan Direksi PT LRT Jakarta tentang Tata Cara Pengeluaran Dana pada PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 003/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Keputusan Direksi PT LRT Jakarta tentang Pemberian Uang Rapat, Honor Kerjasama, Honor Narasumber, dan Biaya Lain Terkait Kegiatan Perusahaan yang Melibatkan Instansi Pemerintah & Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara
- SK Direksi No. 004/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Penempatan Dana pada PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 005/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Keputusan Direksi Tentang Pedoman dan Kebijakan Akutansi

- SK Direksi No. 006/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Pengadaan barang dan jasa dilingkungan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 007/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal SK Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 008/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Aris Rizal Arafah
- SK Direksi No. 009/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Ahmad Nasser
- SK Direksi No. 010/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Ardian Yusuf
- SK Direksi No. 011/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural M. Rifki Piyoh
- SK Direksi No. 012/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Muhamad Soleh
- SK Direksi No. 013/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Melisa Suciati
- SK Direksi No. 014/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Rizki Chairiah
- SK Direksi No. 015/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Helmi Wiratran
- SK Direksi No. 016/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Kurniati
- SK Direksi No. 017/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Randy Arya

- SK Direksi No. 018/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural R. Ananditya Dewangga SE, MBA
- SK Direksi No. 019/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Kustiaman
- SK Direksi No. 020/DRU/111/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Heri Susandi
- SK Direksi No. 001/DRU/111/XI/2019 tanggal 1 November 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Ade Panji Kurniawan
- SK Direksi No. 002/DRU/111/XI/2019 tanggal 1 November 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Fungsi Jabatan Struktural Heriyadi
- SK Direksi No. 001/MSR/111/IX/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Struktur Organisasi P2KPK3 (Panitia Pembina Keselamatan Perkeretaapian dan Keselamatan Kesehatan Kerja) PT LRT JAKARTA
- SK Direksi No. 001/SAR/111/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Surat Keputusan Direksi tentang Standar operasional dan Prosedur Pemeriksaan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian Light Rail Transit (LRT), Jakarta
- SK Direksi No. 001/SBU/111/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Kebijakan Pemilihan Mitra Usaha Dan Penetapan Nilai Komersial Bisnis Non-Farebox PT LRT Jakarta
- SK Direksi No. 001/SBU/111/XI/2019 tanggal 29 November 2019 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan PT LRT Jakarta

TINJAUAN KEUANGAN

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (untuk Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2019) dan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf (untuk Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2018). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

1. POSISI KEUANGAN

Nama Akun	Posisi Keuangan			
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (Audited)	Rp (Audited)	Selisih	Persentase (%)
Aset Lancar	77.462.279.129	140.747.661.339	(63.285.382.210)	-44,96%
Aset Tidak Lancar	36.397.039.491	5.929.255.310	30.467.784.182	513,86%
Jumlah Aset	113.859.318.621	146.676.916.649	(32.817.598.028)	-22,37%
Liabilitas Jangka Pendek	9.796.383.574	3.609.795.344	6.186.588.230	171,38%
Liabilitas Jangka Panjang	2.011.348.789	311.462.797	1.699.885.992	545,77%
Jumlah Liabilitas	11.807.732.363	3.921.258.141	7.886.474.222	201,12%
Jumlah Ekuitas	102.051.586.258	142.755.658.508	(40.704.072.251)	-28,51%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	113.859.318.621	146.676.916.649	(32.817.598.028)	-22,37%

Nama Akun	Aset PT LRT Jakarta			
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (Audited)	Rp (Audited)	Selisih	Persentase (%)
Aset Lancar				
Kas Dan Setara Kas	66.624.188.751	137.269.727.476	(70.645.538.725)	-51,46%
Investasi Jangka Pendek	--	--	--	n/a
Piutang Usaha	6.068.419.105	--	6.068.419.105	100,00%
Piutang Lain-Lain	--	2.884.167.403	(2.884.167.403)	-100,00%
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	356.353.976	--	356.353.976	100,00%
Pajak Dibayar Dimuka	3.300.565.712	134.797.710	3.165.768.002	2348,53%
Biaya Dibayar Dimuka	1.112.751.584	458.968.750	653.782.834	142,45%
Persediaan	--	--	--	n/a
Total Aset Lancar	77.462.279.129	140.747.661.339	(63.285.382.210)	-44,96%
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	17.899.049.270	694.365.727	17.204.683.543	2477,76%
Properti Investasi	--	--	--	n/a
Aset Pajak Tangguhan	18.497.990.221	3.482.344.128	15.015.646.094	431,19%
Aset Lain-Lain	--	1.752.545.455	(1.752.545.455)	-100,00%
Total Aset Tidak Lancar	36.397.039.492	5.929.255.310	30.467.784.182	513,86%
Total Aset	113.859.318.621	146.676.916.649	(32.817.598.028)	-22,37%

Aset Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 22,37% atau sebesar Rp 32,81 miliar menjadi Rp 113,86 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 146,67 miliar.

Dari sisi aset tetap Perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp 17,20 miliar, akan tetapi terjadi penurunan pada aset lancar, yaitu penurunan posisi Kas dan Setara Kas sebesar 51,46% dari yang semula Rp 137,27 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 66,62 miliar per 31 Desember 2019. Penurunan Kas dan Setara Kas digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan selama periode 2019.

Sementara kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar 513,86% atau sebesar Rp 30,47 miliar menjadi Rp 36,40 miliar pada 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh pertumbuhan Aset Tetap sebesar 2477,76% atau sebesar Rp 17,20 miliar serta Aset Pajak Tangguhan sebesar 430,17% atau sebesar Rp 15,02 miliar menjadi 18,50 miliar pada 31 Desember 2019.

Kewajiban & Ekuitas PT LRT Jakarta

Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (Audited)	Rp (Audited)	Selisih	Persentase (%)
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha	5.137.498.816	406.694.916	4.730.803.900	1163,23%
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo Satu Tahun	--	--	--	n/a
Utang Bank Jangka Pendek	--	--	--	n/a
Utang Pajak	586.088.221	210.583.665	375.504.556	178,32%
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.662.877.225	2.992.516.763	670.360.462	22,40%
Pendapatan Diterima Dimuka	--	--	--	n/a
Utang Lain-Lain	409.919.312	--	409.919.312	100,00%
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.796.383.574	3.609.795.344	6.186.588.230	171,38%
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Bank Jangka Panjang	--	--	--	n/a
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2.011.348.789	311.462.797	1.699.885.992	545,77%
Kewajiban Pajak Tangguhan	--	--	--	n/a
Jaminan Sewa Diterima Dimuka	--	--	--	n/a
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	n/a
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.011.348.789	311.462.797	1.699.885.992	545,77%
Total Liabilitas	11.807.732.363	3.921.258.141	7.886.474.222	201,12%
Ekuitas				
Modal Saham	150.000.000.000	150.000.000.000	--	0,00%
Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(7.244.341.492)	--	(7.244.341.492)	100,00%
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(40.704.072.251)	(7.244.341.492)	(33.459.730.759)	461,87%
Ekuitas Neto	102.051.586.258	142.755.658.508	(40.704.072.250)	-28,51%
Total Liabilitas & Ekuitas	113.859.318.621	146.676.916.649	(32.817.598.028)	-22,37%

Total Liabilitas Perusahaan naik sebesar 201,12% atau sebesar Rp 7,89 miliar dari Rp 3,92 miliar pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 11,81 miliar pada 31

Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Liabilitas Jangka Pendek yaitu kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga. Liabilitas Jangka Panjang juga mengalami kenaikan sebesar 545,77% atau sebesar Rp 1,70 miliar dari Rp 0,31 miliar pada 31 Desember 2018 menjadi Rp 2,01 pada 31 Desember 2019.

Ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp 102,05 miliar, mengalami penurunan sebesar 28,51% atau sebesar 40,70 miliar dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 142,76 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kerugian yang lebih besar pada periode 2019 yaitu sebesar 40,70 miliar atau naik sebesar 461,87% dibanding kerugian tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 7,24 miliar.

2. LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN

Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (Audited)	Rp (Audited)	Selisih	Persentase (%)
Pendapatan				
Pendapatan Operasi	740.056.962	--	740.056.962	100,00%
Kompensasi Pemerintah (PSO)	2.744.477.252	--	2.744.477.252	100,00%
Kompensasi Pemerintah (IMO)	3.319.406.155	--	3.319.406.155	100,00%
Total Pendapatan	6.803.940.369	--	6.803.940.369	100,00%
Beban Pokok Penjualan				
Beban Operasi Sarana				
Beban Perawatan Dan Operasi Sarana Perkeretaapian	(8.091.332.212)	--	(8.091.332.212)	100,00%
Beban Sewa Sarana	--	--	--	n/a
Beban Overhead Sarana	(3.545.881.430)	--	(3.545.881.430)	100,00%
Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian	(1.765.000)	--	(1.765.000)	100,00%
Beban Operasi Prasarana Dan Fasilitas Operasi				
Beban Perawatan Bangunan	--	--	--	n/a
Beban Perawatan Operasi Prasarana Dan Fasilitas Operasi P	--	--	--	n/a
Beban Overhead Prasarana Dan Fasilitas Operasi	(1.257.660.012)	--	(1.257.660.012)	100,00%
Beban Penyusutan Prasarana Dan Fasilitas Operasi Perkeret	(19.633.404)	--	(19.633.404)	100,00%
Beban Optimalisasi Aset				
Beban Perawatan Aset Properti	--	--	--	n/a
Beban Pendukung Perawatan Aset Properti	--	--	--	n/a
Jumlah Beban Pokok Penjualan	(12.916.272.058)	--	(12.916.272.058)	100,00%
Beban Umum dan Administrasi				
Beban Penjualan (Iklan, Pameran, Promosi, dll)	(1.096.176.610)	(22.603.100)	(1.073.573.510)	4749,67%
Beban Pegawai	(42.966.423.211)	(11.367.917.235)	(31.598.505.976)	277,96%
Beban Pemeliharaan	(1.799.190.684)	--	(1.799.190.684)	100,00%
Beban Penyusutan	(728.265.535)	(53.958.224)	(674.307.311)	1249,68%
Beban Jasa Profesional	(3.488.254.215)	(219.012.000)	(3.269.242.215)	1492,72%
Beban Umum	(5.095.277.395)	(2.283.943.629)	(2.811.333.766)	123,09%
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	(55.173.587.650)	(13.947.434.188)	(41.226.153.462)	295,58%
Pendapatan/Beban Lainnya				
Pendapatan Lainnya	7.308.304.645	3.962.649.073	3.345.655.573	84,43%
Beban Lainnya	(1.304.736.915)	(741.900.506)	(562.836.409)	75,86%
Pendapatan/Beban Lainnya Neto	6.003.567.731	3.220.748.567	2.782.819.163	86,40%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(55.282.351.608)	(10.726.685.620)	(44.555.665.988)	415,37%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	14.906.304.410	3.482.344.128	11.423.960.282	328,05%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	(328.025.051)	--	(328.025.051)	100,00%
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(40.704.072.250)	(7.244.341.492)	(33.459.730.757)	461,87%

Pada tahun 2019, Perusahaan mencatatkan total pendapatan sebesar Rp 6,80 miliar dimana pendapatan ini adalah pendapatan operasi komersial yang baru dimulai per tanggal 1 Desember 2019. Pendapatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 karena pada tahun 2018 Perusahaan belum beroperasi komersial sehingga belum mencatatkan pendapatan. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan operasi sebesar Rp 0,74 miliar, pendapatan subsidi sarana (PSO) sebesar Rp 2,74 miliar, dan pendapatan subsidi prasarana (IMO) sebesar Rp 3,32 miliar.

Beban Pokok Penjualan tercatat sebesar Rp 12,92 miliar. Beban tersebut terdiri dari Beban Operasi Sarana dan Beban Operasi Prasarana & Fasilitas Operasi yang masing-masing tercatat sebesar Rp 11,6 miliar dan Rp 1,3 miliar.

Untuk Beban Usaha Perusahaan, yaitu Beban Umum dan Administrasi tercatat naik sebesar 295,58% dari Rp 13,95 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 55,17 miliar di tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh:

- Beban gaji dan kesejahteraan karyawan naik sebesar 277,96% dari Rp 11,37 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 42,97 miliar di tahun 2019 seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan yang telah mencapai 277 orang pada tahun 2019.
- Beban Jasa Profesional naik sebesar 1492,72% dari Rp 0,22 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 3,49 miliar di tahun 2019. Salah satu Beban Jasa Profesional yang bernilai cukup besar yaitu Jasa Konsultan Kajian Non-Farebox.
- Beban Umum tercatat mengalami kenaikan sebesar 123,09% dari Rp 2,28 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 5,10 miliar di tahun 2019. Beban umum yang tercatat termasuk diantaranya beban sewa kendaraan operasional, Beban Rapat Kerja, Beban Sewa Peralatan Kantor, Beban Telepon & Internet, Beban ATK APK dan Beban Habis Pakai lainnya.

Sementara itu, penghasilan lain-lain mengalami kenaikan sebesar 86,40% dari Rp 3,22 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 6,00 miliar di tahun 2019. Begitupun dengan rugi tahun berjalan yang tercatat naik 415,37% dari Rp 10,73 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 55,28 miliar di tahun 2019. Dan Perusahaan mengalami kenaikan kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar 461,87% atau sebesar Rp 33,46 miliar dari yang semula Rp 7,24 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 40,70 miliar pada tahun 2019.

3. ARUS KAS

	Arus Kas			
	31 Desember 2019 Rp (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 Rp (<i>Audited</i>)	Kenaikan (Penurunan)	
			Selisih	Persentase (%)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	(56.986.364.442)	(10.229.403.118)	(46.756.961.324)	457,08%
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(16.180.403.623)	(2.500.869.406)	(13.679.534.217)	546,99%
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	2.521.229.340	150.000.000.000	(147.478.770.660)	-98,32%
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(70.645.538.725)	137.269.727.476	(207.915.266.201)	-151,46%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	137.269.727.476	--	137.269.727.476	100,00%
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	66.624.188.751	137.269.727.476	(70.645.538.725)	-51,46%

Kas dan setara kas akhir periode 2019 tercatat mengalami penurunan menjadi Rp 66,62 miliar dari Rp 137,27 miliar di awal tahun 2019, yang dikarenakan pergerakan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi.

Arus kas aktivitas operasi

Arus Kas aktivitas operasi

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (<i>Audited</i>)	Rp (<i>Audited</i>)	Selisih	Persentase (%)
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	903.833.954	--	903.833.954	100,00%
Pembayaran Kas Kepada Pengurus Dan Karyawan	(45.140.826.602)	(9.373.902.382)	(35.766.924.220)	381,56%
Pembayaran Kas Untuk Beban Usaha Dan Operasional Lainnya	(19.541.049.918)	(2.359.500.736)	(17.181.549.182)	728,19%
Penerimaan Bunga Deposito dan Giro	6.791.678.123	1.504.000.000	5.287.678.123	351,57%
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(56.986.364.442)	(10.229.403.118)	(46.756.961.324)	457,08%

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tercatat meningkat 457,08% atau sebesar Rp 46,76 miliar dari Rp 10,23 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 58,99 miliar di tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran kepada vendor dan pemasok yang meningkat 728,19% atau sebesar Rp 11,18 miliar dari 2,36 miliar di tahun 2018 menjadi 19,54 miliar pada tahun 2019. Selain penggunaan kas operasi tersebut Perusahaan juga mengalami kenaikan dari penerimaan bunga deposito dan giro sebesar 351,57% atau sebesar Rp 5,29 miliar dari 1,50 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 6,80 di tahun 2019. Di tahun 2019 Perusahaan juga mendapatkan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 0,90 miliar.

Arus kas aktivitas investasi

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (<i>Audited</i>)	Rp (<i>Audited</i>)	Selisih	Persentase (%)
Perolehan/Pelepasan Aset Lain-Lain	(1.761.561.279)	--	(1.761.561.279)	100,00%
Perolehan/Pelepasan Aset Tetap	(14.418.842.344)	(2.500.869.406)	(11.917.972.938)	476,55%
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(16.180.403.623)	(2.500.869.406)	(13.679.534.217)	546,99%

Perolehan aset tetap dari arus kas untuk investasi per 31 Desember 2019 tercatat minus Rp 14,42 miliar atau naik 476,55% dari minus Rp 2,50 miliar di tahun 2018. Peningkatan ini digunakan untuk investasi seiring dengan persiapan operasi Perusahaan di penghujung tahun 2019.

Arus kas aktivitas pendanaan

Arus Kas aktivitas operasi

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (Audited)	Rp (Audited)	Selisih	Persentase (%)
Penerimaan Tambahan Setoran Modal	--	150.000.000.000	(150.000.000.000)	-100,00%
Penerimaan/Pembayaran Dari Pihak Berelasi	2.521.229.340	--	2.521.229.340	100,00%
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	2.521.229.340	150.000.000.000	(147.478.770.660)	-98,32%

Di tahun 2019 tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan berupa tambahan setoran modal, hanya terdapat penerimaan kas bersih dari pihak berelasi dalam hal ini PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atas penggantian biaya *Trial Run* LRT Jakarta.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	YoY
	Rp (Audited)	Rp (Audited)	2018-2019 (%)
Rasio Lancar	7,91	38,99	-79,72%
Rasio Kas	6,80	38,03	-82,12%
Quick Ratio	7,46	38,83	-80,79%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	0,12	0,03	321,23%
Rasio Utang Jangka Pendek untuk Ekuitas	0,10	0,03	279,63%
Rasio Utang Jangka Panjang untuk Ekuitas	0,02	0,00	803,35%
Rasio Utang Terhadap Aset	0,10	0,03	287,91%

Perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang baik, hal ini terlihat dari rasionya di tahun 2019 yaitu 7,91% untuk *current ratio*, 6,80% untuk *cash ratio* dan 7,46% untuk *quick ratio*. Meskipun turun dibanding tahun 2018 namun tidak signifikan sehingga Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan masih dalam kondisi sehat dan mampu untuk memenuhi segala kewajiban baik untuk jangka pendek maupun jangka Panjang.

Hutang terhadap kontraktor dan konsultan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi penyelesaian proyek dibiayai dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tercatat di PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku penerima PMD untuk pembangunan LRT Jakarta sehingga tidak tercerminkan pada laporan keuangan Perusahaan.

Sedangkan untuk tingkat kolektibilitas, sampai dengan Desember 2019, lama periode penagihan piutang adalah 1 hari khususnya untuk settlement kartu uang elektronik yang dimana Perusahaan telah bekerja sama dengan 5 Bank yang mana kartu uang elektronik dari masing-masing bank tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran tiket LRT Jakarta

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Struktur modal perusahaan tahun 2019 yang terdiri dari utang jangka pendek, jangka Panjang dan ekuitas dan perbandingannya dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Akun	31 Desember 2019		31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Selisih	Persentase (%)
Liabilitas Jangka Pendek	9.796.383.574	8,60%	3.609.795.344	2,46%	6.186.588.230	171,38%
Liabilitas Jangka Panjang	2.011.348.789	1,77%	311.462.797	0,21%	1.699.885.992	545,77%
Jumlah Liabilitas	11.807.732.363	10,37%	3.921.258.141	2,67%	7.886.474.222	201,12%
Jumlah Ekuitas	102.051.586.258	89,63%	142.755.658.508	97,33%	(40.704.072.251)	-28,51%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	113.859.318.621	100,00%	146.676.916.649	100,00%	(32.817.598.028)	-22,37%

Jumlah modal yang diinvestasikan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 22,37% atau sebesar Rp 32,82 miliar dari sebelumnya Rp 146,68 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 113,86 pada akhir tahun 2019. Untuk liabilitas mengalami kenaikan baik untuk liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan 171,38% atau sebesar Rp 6,19 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 3,61 miliar di tahun 2018 menjadi 9,80 miliar di tahun 2019. Demikian pula dengan liabilitas jangka Panjang tercatat naik sebesar 545,77% atau sebesar 1,70 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 0,31 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 2,01 miliar di tahun 2019.

Dalam mengelola permodalannya, Perusahaan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham dengan mempertimbangkan:

- Efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas yang digunakan untuk kegiatan operasi.
- Pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Selama tahun 2019 Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut dan langkah-langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi pihak lain.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (<i>Audited</i>)	Rp (<i>Audited</i>)	Selisih	Persentase (%)
Realisasi Investasi Barang Modal	11.228.972.056	748.323.951	10.480.648.105	1400,55%

Investasi barang modal di tahun 2019 mengalami kenaikan hingga 1400,55% atau sebesar Rp 10,48 miliar dari 0,75 miliar di tahun 2018 menjadi 11,23 miliar di tahun 2019.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2019 tidak terdapat peningkatan modal baik modal ditempatkan maupun modal disetor. Berdasarkan Akta Perubahan No. 114 dari Notaris Wiwik Condro, S.H., tanggal 29 Oktober 2019, yang berisi tentang perubahan susunan dewan komisaris dan direksi. Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 150.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 150.000.000.000. Akta juga sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-035617 tanggal 6 November 2019. Modal tersebut merupakan modal saat pendirian Perusahaan pada 16 April 2018 dan sudah diaktakan melalui Akta No. 10 tanggal 16 April oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., Mkn., Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2018 dengan surat keputusan No. AHU-0020380.AH.01.01 Tahun 2018.

INFORMASI LAINNYA TENTANG INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN /ATAU RESTRUKTURISASI UTANG

Perusahaan tidak memiliki informasi material terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang di tahun 2019.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET ANGGARAN DENGAN REALISASI, DAN PROYEKSI USAHA

	Realisasi 2019	Target 2019	Pencapaian		Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019	Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019
			Realisasi Terhadap Target 2019	Proyeksi 2020		
Pendapatan	6.803.940.369	155.175.901.688	4,38%	264.661.650.860	3889,83%	170,56%
Beban Pokok Penjualan	(12.916.272.058)	(107.782.226.141)	11,98%	(171.506.375.566)	1327,83%	159,12%
Laba (Rugi) Kotor	(6.112.331.689)	47.393.675.547	-12,90%	93.155.275.294	-1524,05%	196,56%
beban Usaha	(55.173.587.650)	(63.680.757.843)	86,64%	(58.939.674.877)	106,83%	92,55%
Pendapatan/Beban Lainnya	6.003.567.731	3.273.462.575	183,40%	4.141.666.667	68,99%	126,52%
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(55.282.351.608)	(13.013.619.722)	424,80%	38.357.267.083	-69,38%	-294,75%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	14.578.279.359	--	0,00%	(9.501.783.589)	-65,18%	0,00%
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun	(40.704.072.250)	(13.013.619.722)	312,78%	28.855.483.494	-70,89%	-221,73%

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan membukukan rugi bersih komprehensif sebesar Rp 40,70 miliar atau 312,78% dari rencana kerja anggaran tahun 2019 sebesar Rp 13,01 miliar. Pencapaian rugi bersih ini melebihi target yang direncanakan terutama disebabkan oleh pergeseran dimulainya operasi komersial yang semula direncanakan mulai beroperasi komersial pada bulan Juni 2019 menjadi mulai beroperasi komersial pada bulan Desember 2019, hal ini menyebabkan target pendapatan tidak sesuai dengan pencapaian.

Proyeksi Perusahaan tahun 2020 mengalami laba bersih sebesar Rp 28,85 miliar rupiah meningkat dari target 2019 sebesar Rp (13,03) miliar. Peningkatan signifikan ini disebabkan pada tahun 2020 Perusahaan sudah dalam fase operasi komersial penuh selama satu tahun, sehingga di proyeksikan Perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp 264,66 miliar.

Beban Pokok Penjualan

	Realisasi 2019	Target 2019	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019	Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019
Beban Pokok Penjualan						
Beban Operasi Sarana						
Beban Perawatan Dan Operasi Sarana Pe	8.091.332.212	35.479.812.494	22,81%	60.763.882.414	750,98%	171,26%
Beban Sewa Sarana	--	6.962.823.931	0,00%	10.290.698.917	--	147,79%
Beban Overhead Sarana	3.545.881.430	24.174.532.523	14,67%	50.367.215.816	1420,44%	208,35%
Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapi	1.765.000	8.023.917.616	0,02%	6.147.227.350	348284,84%	76,61%
Beban Operasi Prasarana Dan Fasilitas Operasi						
Beban Perawatan Bangunan	--	21.504.862.718	0,00%	--	--	0,00%
Beban Perawatan Operasi Prasarana Dan	--	--	--	2.813.848.000	--	--
Beban Overhead Prasarana Dan Fasilitas	1.257.660.012	9.606.516.267	13,09%	32.544.290.411	2587,69%	338,77%
Beban Penyusutan Prasarana Dan Fasilitas	19.633.404	2.029.760.593	0,97%	2.625.495.895	13372,60%	129,35%
Beban Optimalisasi Aset						
Beban Perawatan Aset Properti	--	--	--	574.816.764	--	--
Beban Pendukung Perawatan Aset Proper	--	--	--	5.378.900.000	--	--
Jumlah Beban Pokok Penjualan	12.916.272.058	107.782.226.141	11,98%	171.506.375.566	1327,83%	159,12%

Beban Pokok Penjualan tercatat sebesar Rp 12,92 miliar. Beban tersebut terdiri dari Beban Operasi Sarana dan Beban Operasi Prasarana & Fasilitas Operasi yang masing-masing tercatat sebesar Rp 11,6 miliar dan Rp 1,3 miliar. Pencapaian Beban Pokok Penjualan secara keseluruhan hanya 11,98% dari target 2019 sebesar Rp 107,78 miliar. Hal ini dikarenakan pada target 2019 Perusahaan diasumsikan mulai beroperasi komersial pada bulan Juni 2019, sedangkan pada realisasinya Perusahaan baru mulai beroperasi komersial pada bulan Desember 2019.

Beban administrasi dan umum

	Realisasi 2019	Target 2019	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019	Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019
Beban Umum dan Administrasi						
Beban Penjualan (Iklan, Pameran, Promosi, d	(1.096.176.610)	(5.102.184.522)	21,48%	(4.326.000.000)	394,64%	84,79%
Beban Pegawai	(42.966.423.211)	(29.992.672.283)	143,26%	(19.208.864.151)	--	64,05%
Beban Pemeliharaan	(1.799.190.684)	(225.000.000)	799,64%	--	0,00%	0,00%
Beban Penyusutan	(728.265.535)	(4.393.228.441)	16,58%	(6.831.113.411)	938,00%	155,49%
Beban Jasa Profesional	(3.488.254.215)	(2.477.700.000)	140,79%	(5.986.450.000)	171,62%	241,61%
Beban Umum	(5.095.277.395)	(21.489.972.597)	23,71%	(22.587.247.316)	443,30%	105,11%
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	(55.173.587.650)	(63.680.757.843)	86,64%	(58.939.674.877)	106,83%	92,55%

Perusahaan membukukan total beban usaha (beban administrasi dan umum) sebesar Rp 55,17 miliar di tahun 2019 atau 86,64% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 63,68 miliar. Berikut highlight pencapaian biaya tahun 2019:

- Beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 42,97 miliar atau 143,26% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp 29,99 miliar. Hal ini disebabkan beban pegawai langsung seperti pegawai sarana dan prasarana yang masih terakumulasi di beban pegawai umum dan belum tercatat di beban pokok penjualan dikarenakan sampai dengan 30 November 2019 Perusahaan belum mulai beroperasi secara komersial.
- Beban Jasa Profesional tercatat sebesar Rp 3,49 miliar atau 140,79% dari anggaran 2019 sebesar Rp 2,48 miliar. Salah satu Beban Jasa Profesional yang bernilai cukup besar yaitu Jasa Konsultan Kajian Non-Farebox.
- Beban Umum tercatat sebesar 5,10 miliar atau sebesar 23,71% dibandingkan dengan target anggaran 2019 sebesar Rp 21,49 miliar. Beban umum yang tercatat termasuk diantaranya beban sewa kendaraan operasional, Beban Rapat Kerja, Beban Sewa Peralatan Kantor, Beban Telepon & Internet, Beban ATK APK dan Beban Habis Pakai lainnya.

Total beban pokok dan beban administrasi dan umum sebesar Rp 68,09 miliar, atau 39,71% dari anggaran 2019 sebesar Rp 171,46 miliar. Biaya yang tercatat pada tahun 2019 seluruhnya digunakan untuk menunjang menuju kegiatan operasi komersial pada tahun 2019.

Posisi Keuangan

	Realisasi 2019	Target 2019	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019	Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019
Aset Lancar	77.462.279.129	90.542.710.639	85,55%	49.859.952.969	64,37%	55,07%
Aset Tidak Lancar	36.397.039.491	276.754.119.254	13,15%	545.998.410.487	1500,12%	197,29%
Jumlah Aset	113.859.318.621	367.296.829.893	31,00%	595.858.363.457	523,33%	162,23%
Liabilitas Jangka Pendek	9.796.383.574	1.881.511.087	520,67%	3.155.191.246	32,21%	167,69%
Liabilitas Jangka Panjang	2.011.348.789	--	100,00%	297.427.451.380	14787,46%	--
Jumlah Liabilitas	11.807.732.363	1.881.511.087	627,57%	300.582.642.626	2545,64%	15975,60%
Jumlah Ekuitas	102.051.586.258	365.415.318.806	27,93%	295.275.720.831	289,34%	80,81%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	113.859.318.621	367.296.829.893	31,00%	595.858.363.457	523,33%	162,23%

Perusahaan mencatatkan total aset pada tahun 2019 sebesar Rp 113,86 miliar atau 31,00% dari rencana tahun 2019 sebesar 367,30 miliar. Pencapaian yang tidak maksimal ini dikarenakan pada penyusunan target tahun 2019, direncanakan untuk dilaksanakan penambahan modal dari Pemegang Saham berupa inbreng aset sarana sebanyak 3 set LRV dan fasilitas operasi berupa *Automatic Fair Collection (AFC)* masing masing sebesar Rp 167,65 miliar dan Rp 69,96 miliar. Akan tetapi rencana kegiatan inbreng ini tidak terlaksanakan pada tahun 2019.

Kegiatan inbreng ini kembali direncanakan didalam proyeksi tahun 2020 dimana total aset yang diproyeksikan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 595,86 miliar termasuk didalamnya nilai dari 3 set LRV yang diinbrengkan dan 5 set LRV yang akan disewakan jangka panjang oleh Pemegang Saham.

TINJAUAN KEUANGAN LAIN

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

Hingga tahun 2019, Perusahaan belum membukukan laba yang dapat dijadikan dividen untuk dibagikan semenjak awal beroperasi secara komersial pada 1 Desember 2019. Oleh karena itu Perusahaan tidak memiliki informasi mengenai kebijakan pembagian dividen, total dividen yang dibagikan, jumlah dividen kas per saham, payout ratio dan tanggal pengumuman dan pembayaran kas untuk masing-masing tahun.

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan sebagai salah satu kontribusi kepada Negara/Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan. Karena hal tersebut, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu kontribusi kepada Negara/Pemerintah Pusat. Di sepanjang tahun 2019, kontribusi pembayaran pajak Perusahaan tercatat sebesar Rp 2,31 miliar, meningkat 4363,46% dibandingkan kontribusi pembayaran pajak tahun 2018 yang hanya tercatat sebesar Rp 0,05 miliar. Rincian pembayaran pajak Perusahaan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Rp (Audited)	Rp (Audited)	Selisih	Persentase (%)
PPh 4 ayat 2	236.705.047	4.030.644	232.674.403	5772,64%
PPh 21	1.722.122.413	32.338.097	1.689.784.316	5225,37%
PPh 22	803.973	--	803.973	100,00%
PPh 23	347.089.025	15.311.299	331.777.726	2166,88%
Jumlah Kontribusi Pajak	2.306.720.458	51.680.040	2.255.040.418	4363,46%

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KAR YAWAN DAN /ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi karyawan (ESOP) dan manajemen (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait ESOP/MSOP yang dilakukan Perusahaan.

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sejak berdiri pada 16 April 2018 hingga 31 Desember 2019, Perusahaan belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Perusahaan juga tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN /ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI /PIHAK BERELASI

Kebijakan tentang pihak berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 10), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak pihak yang tidak berelasi.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, Sifat Transaksi, serta Alasan Dilakukannya Transaksi

Berikut disampaikan nama pihak bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi untuk transaksi Perusahaan di sepanjang tahun 2017 dan 2018.

Pihak yang Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi	Alasan Dilakukannya Transaksi
PT Jakarta Propertindo (Perseroda, Pemegang Saham)		Laporan Konsolidasi	Hubungan induk dan anak usaha
PT Transportasi Jakarta	Dalam Pengendalian Bersama	<i>Integrated Payment</i>	Integrasi antarmoda transportasi publik di Jakarta
PT Bank DKI	Dalam Pengendalian Bersama	Penempatan Deposito	Tingkat bunga sebanding dengan bank lainnya

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Perusahaan dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga transaksi dengan pihak-pihak berelasi tetap disajikan dalam laporan keuangan. Semua berdasarkan peraturan yang berlaku dari setiap instansi yang melakukan perikatan.

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi sesuai PSAK No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dalam laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono. Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan akhir Desember 2019, Perusahaan tidak mengalami transaksi yang bersifat luar biasa (*Extra ordinary item*) sesuai PSAK 25.

Proyeksi Tahun 2020

Manajemen telah menyusun proyeksi pencapaian tahun 2020 yang didasarkan oleh berbagai asumsi, antara lain :

1. Operasi Komersial telah dilaksanakan pada 1 Desember 2019,
2. Proses Pemantauan Pencapaian SPM terait dengan subsidi,
3. Kontinuitas sertifikasi,
4. Perkembangan persiapan operasi komersial :
 - Sertifikasi Sarana LRV, Jalur & Bangunan dan Fasilitas Operasi,
 - Proses perekrutan Sumber Daya Manusia yang efektif sesuai dengan rencana kebutuhan operasi komersial,
 - Persiapan *marketing campaign* yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik.
5. Perkembangan infrastruktur pendukung yang berhubungan dengan Keuangan, SDM, serta Informasi & Teknologi, serta
6. Perkembangan rencana bisnis untuk meningkatkan ridership dan pendapatan nonfarebox

Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta telah siap untuk dioperasikan pada awal Desember tahun 2019, dengan 6 (enam) stasiun LRT Jakarta yang siap untuk menerima penumpang.

A. Prospek Perusahaan

Layanan Perkeretaapian LRT Jakarta untuk Koridor I (terdiri atas 3 Fase) dengan panjang rute \pm 40 km yang melingkari Kota Jakarta, ditargetkan selesai dan siap dioperasikan secara komersial di pertengahan tahun 2022. Disamping itu, terdapat rencana pembangunan untuk Koridor II hingga koridor IV dengan target penyelesaian secara keseluruhan di tahun 2030.

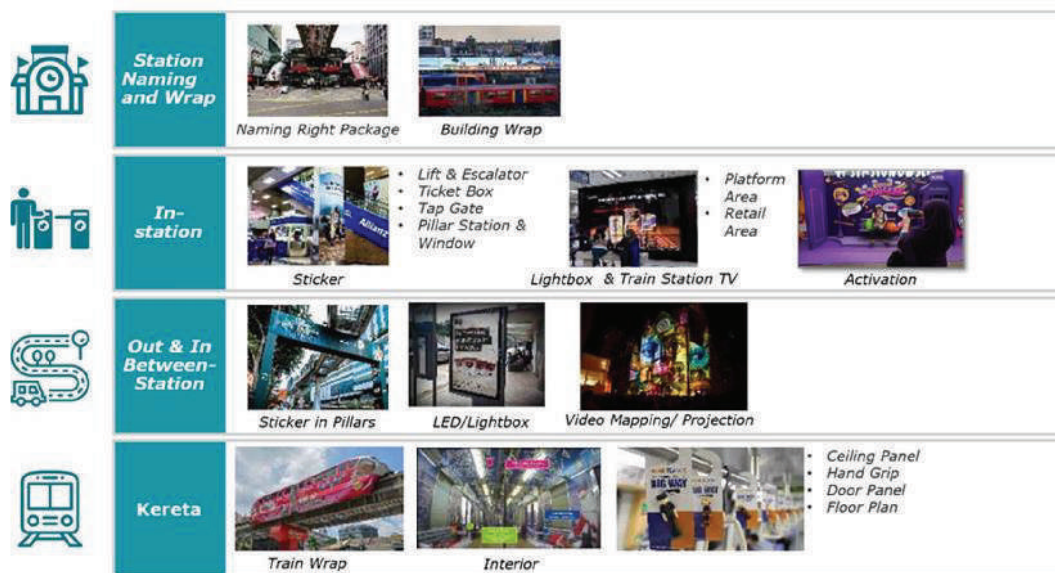
Konsep integrasi antar moda transportasi publik dimana, MRT Jakarta sebagai *backbone compass line*, LRT Jakarta sebagai pengumpan (*feeder*) yang melingkari rute MRT Jakarta, serta integrasi dengan BRT Transjakarta untuk memastikan integrasi pelayanan transportasi publik kepada warga DKI Jakarta (khususnya) benar-benar terlaksana sampai dengan integrasi sistem pembayaran.

Maka dengan penguasaan terhadap fasilitas operasi LRT Jakarta, perusahaan memiliki potensi besar untuk menjadi single operator dalam penyelenggaraan layanan perkeretaapian LRT Jakarta.

Tahun 2019 akan menjadi tahun bersejarah bagi Perusahaan serta bagi Negara Indonesia. Proyek LRT Jakarta merupakan proyek nasional yang telah dinantikan oleh banyak pihak; baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; PT Jakarta Propertindo sebagai pemegang saham, maupun masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Sejalannya dengan dimulainya operasi komersil LRT Jakarta pada 1 desember 2019, Perusahaan diwajibkan untuk mengelola pengoperasian dan pemeliharaan LRT Jakarta, sekaligus mengusahakan kegiatan bisnis yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh karena itu Perusahaan telah memiliki sejumlah rencana yang sudah di koordinasikan dengan PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku pemegang hak pengusahaan dan pemegang saham untuk dapat mengoptimalkan kegiatan bisnis tersebut.

Adapun rencana kegiatan usaha pada tahun 2020, sebagai berikut:



1. Hak Penamaan Stasiun : Hak penamaan stasiun yang di berikan kepada *potential partner*
2. Periklanan dalam stasiun
3. Periklanan luar ruang stasiun, contoh: pilar penyangga stasiun
4. Periklanan pada *rolling stock*, contoh: badan luar kereta, dalam kereta dan *hand grip*

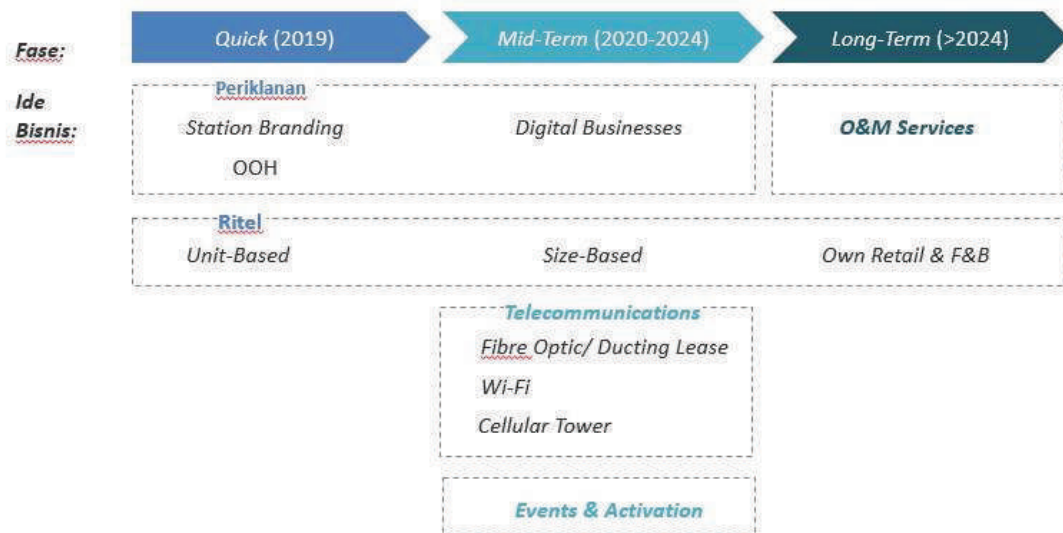
Seperti yang tergambar pada penjelasan di atas, Perusahaan memiliki rencana bisnis pada tahun 2020, dengan memfokuskan pada aspek periklanan, dengan landasan utama mengedepankan layanan bagi penumpang LRT Jakarta sekaligus membangun model usaha yang berkelanjutan.

B. Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar

Persiapan Pengembangan Usaha dari pendapatan diluar tiket (Non-Farebox) dilakukan sejalan dengan rencana pengoperasian penuh LRT Jakarta di tahun 2019, Perusahaan telah mempersiapkan model bisnis dan rencana pengembangan usaha melalui beberapa potensi usaha. Kajian peyiapan rencana model bisnis dan pengembangan usaha tersebut dilakukan PT LRT Jakarta dibantu oleh PT Deloitte Indonesia.

Berdasarkan kajian tersebut maka selain pemasukan dari tiket, Perusahaan juga akan mengembangkan usaha Non-Farebox, dengan beberapa bidang usaha antara lain periklanan, ritel,telekomunikasi dan lain lain. Rencana pengembangan usaha ini bertujuan untuk mendukung biaya operasional dan pemeliharaan LRT Jakarta dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan publik dalam jangka pendek, dan kemandirian secara finansial serta nilai keekonomian bagi pemegang saham dan investor dalam jangka panjang. Perusahaan memutuskan pengembangan bisnis Non-Farebox membutuhkan kemitraan dengan pihak eksternal guna memperoleh hasil yang optimal dan memaksimalkan pengembalian finansial.

Rencana pengembangan usaha akan dibagi dalam beberapa fase yakni quick win, mid-term dan long term, sebagai berikut:



Berdasarkan fase pengembangan usaha tersebut diatas untuk awal LRT Jakarta memprioritaskan bisnis advertising dan ritel sebagai quick win bisnis Non-farebox.

Di tahun 2019, sebagai langkah sinergi antara anak usaha dilingkungan PT Jakarta Propertindo, maka PT LRT Jakarta telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai Mitra Penyedia Layanan Periklanan di Area Operasional LRT Jakarta Fase 1 dimana dalam kerjasama ini PT Jakarta Infrastruktur Propertindo didukung oleh PT Prisma Harapan yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang periklanan. Hingga akhir tahun 2019, perencanaan bisnis dari periklanan telah mencapai 30%, dengan dimulainya pemasangan media periklanan *Videotron* di beberapa stasiun LRT Jakarta.

Kesiapan bisnis Non-Farebox lainnya adalah usaha ritel di Stasiun LRT Jakarta dan Depo LRT Jakarta. Dalam pelaksanaan bisnis ritel, PT LRT Jakarta mempunyai dua konsep yang berbeda untuk usaha/mitra ritel yang akan berkerjasama, yakni Mitra Ritel Regular dan Mitra Ritel UMKM. Pelaksanaan usaha Ritel PT LRT Jakarta dengan melakukan seleksi terhadap mitra Ritel dan mitra UMKM. Hingga akhir tahun 2019 telah dilaksanakan lelang untuk pemilihan Mitra Ritel Regular dan Mitra UMKM

Disamping itu untuk bisnis ritel, LRT Jakarta juga bekerja sama dengan Penyedia Vending Machine, dimana diakhir tahun 2019 sudah mulai terpasang beberapa Vending Machine di Stasiun dan Depo LRT Jakarta

C. Informasi Rencana Penambahan Modal melalui Inbreng

Sebagai penyelenggara sarana dalam layanan perkeretaapian LRT Jakarta, maka perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin operasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah kepemilikan paling sedikit

2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian (referensi : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian).

Disamping itu, untuk kepentingan operasi dan perawatan atas *Automatic Fare Collection* (AFC) yakni sistem *ticketing* yang akan digunakan dalam penyelenggaraan layanan perkeretaapian LRT Jakarta, serta sebagai salah satu bagian dari komponen subsidi PSO (Subsidi Sarana) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api, perusahaan perlu untuk memiliki sistem *ticketing* AFC dimaksud.

Untuk keperluan diatas, PT Jakpro sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus sebagai pemilik 8 (delapan) Trainset Sarana LRV, akan melakukan penambahan modal kepada perusahaan melalui Inbreng Aset berupa:

1. 3 (tiga) Trainset Sarana LRV, dan
2. AFC LRT Jakarta.

05

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERSEROAN

1. KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan angkutan komuter yang berwawasan lingkungan sebagai bagian dari misi perusahaan. Realisasi terhadap misi tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyediaan sarana kereta berpengerak listrik. Dengan mengoperasikan sarana kereta berpengerak listrik, Perseroan telah berpartisipasi dalam penggunaan energi baru – terbarukan (renewable energy) serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

2. TANGGUNGJAWAB SOSIAL ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sebagai penyedia layanan jasa transportasi publik, Perseroan menempatkan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai faktor penting dalam kegiatan operasional. Dalam perspektif tersebut, K3 merupakan landasan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman di mana seluruh pegawai dapat bekerja secara optimal dan menghadirkan layanan jasa transportasi publik yang andal di wilayah pelayanan PT LRT Jakarta.

Pelaksanaan program K3 selama tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja melalui program dan kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai secara langsung, antara lain:

- a. Pemeriksaan kesehatan berkala tahunan (MCU) bagi pegawai tahunan diberlakukan untuk pegawai, bukan pegawai yg baru direkrut.
- b. Pelaksanaan Health Risk Assessment (HRA) yang bersifat Pre-Operation (Sebelum operasional pelayanan dimulai) bagi Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) untuk guna memastikan bahwa pelaksanaan layanan operasi dilakukan oleh sumber daya yang memenuhi persyaratan Kesehatan sehingga memberikan jaminan atas keselamatan penumpang dan mengurangi resiko bahaya di tempat kerja.
- c. Penyelenggaraan *Tabletop LRT Emergencies Exercise* sebagai prosedur standar penanganan keadaan darurat di area Prasarana dan Sarana LRT Jakarta, yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan oleh regulator (Dinas Perhubungan DKI Jakarta).

06

Tata Kelola Perseroan



PRINSIP DASAR TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Pendahuluan

Dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan risiko bisnis yang semakin beragam mendorong PT LRTJ senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Penerapan Governance, Risk Management & Compliance (GRC) menjadi penting dengan siklus bisnis yang penuh ketidakpastian dan dinamis menuntut Perusahaan senantiasa siap dan fleksibel dalam menghadapi perubahan yang memberikan peluang maupun hambatan dalam mencapai tujuan Perusahaan.

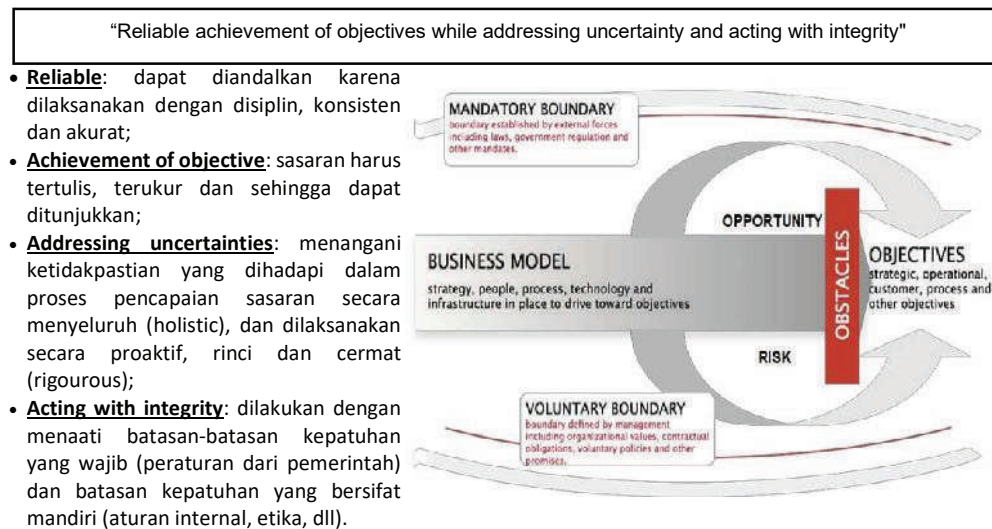
GRC sendiri merupakan sebuah pendekatan organisasi yang berkaitan dengan tiga bidang utama, yaitu tata kelola perusahaan, manajemen risiko korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. GRC mengacu pada SDM, proses, teknologi, dan informasi yang membantu perusahaan mencapai kondisi kinerja berprinsip (*principled performance*), yaitu membuat organisasi/perusahaan mampu diandalkan untuk mencapai targetnya, sambil menangani ketidakpastian/risiko yang dihadapi dan tetap berintegritas dalam bertindak. Pengendalian risiko sebagai bagian dalam proses Manajemen Risiko PT LRTJ merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan manajemen di seluruh level guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan telah diidentifikasi dan dikelola sedemikian rupa sehingga risiko dimaksud berada dalam batas-batas yang dapat diterima.

2. Pencapaian Penerapan GCG yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Manajemen PT LRTJ sepenuhnya menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) maupun penerapan Manajemen Risiko Korporasi Terpadu/*Enterprise Risk Management* (ERM) dan manajemen kepatuhan untuk pencapaian kinerja Perusahaan (GRC). Manajemen Perusahaan senantiasa mengoptimalkan penerapan GRC secara berkesinambungan dengan terus melakukan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, pengujian keandalan, serta penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi atau ketentuan yang berlaku. GRC menjadi penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi

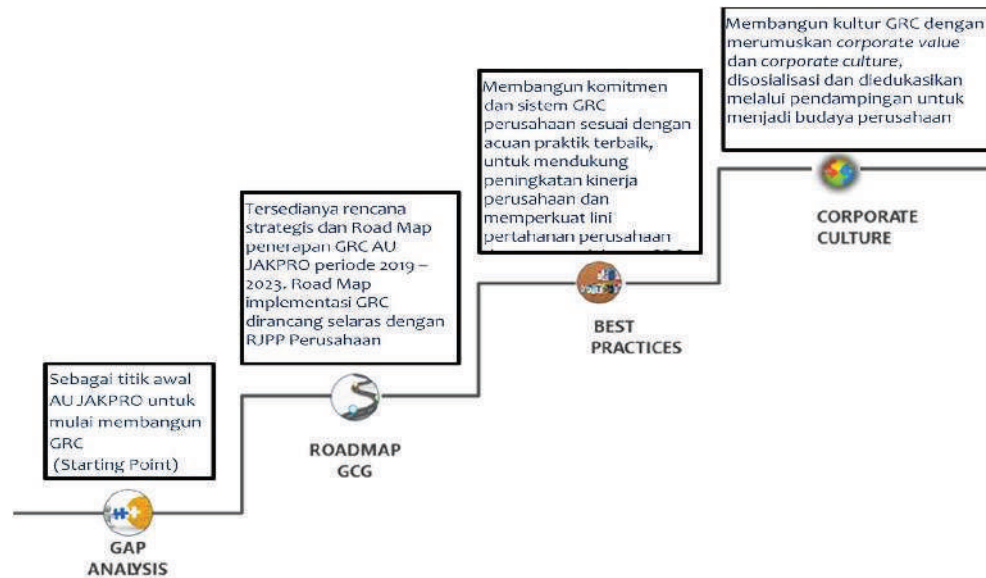
kepentingan para Pemegang Saham (*Shareholders*) maupun para Pemangku Kepentingan lainnya (*Stakeholders*).

GRC merupakan suatu kapabilitas yang menghasilkan principled performance membuat organisasi mampu diandalkan untuk mencapai sarasanya, sambil menangani ketidakpastian yang dihadapi dan tetap berintegritas dalam bertindak.



Sebagai wujud pengembangan GRC, Jakpro Group dan PT LRTJ telah melakukan Gap Analysis yang didampingi oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terhadap kondisi saat ini, penyusunan langkah-langkah kerja (*Area of Improvement*) sehingga diharapkan pada tahun 2020 penerapan GRC dapat berjalan dengan baik. Langkah strategis (*Roadmap*) penerapan GRC yang akan dilakukan hingga tahun 2023 dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:

Sebagai wujud pengembangan GRC, Jakpro Group dan PT LRTJ telah melakukan Gap Analysis yang didampingi oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terhadap kondisi saat ini, penyusunan langkah-langkah kerja (*Area of Improvement*) sehingga diharapkan pada tahun 2020 penerapan GRC dapat berjalan dengan baik. Langkah strategis (*Roadmap*) penerapan GRC yang akan dilakukan hingga tahun 2023 dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:



Bagan 1: Roadmap Rencana Penerapan GRC tahun 2019 Sampai Dengan 2023

Secara garis besar di tahun 2019 ini telah dilaksanakan tahap pertama pembangunan GRC (*starting point*) yaitu pembangunan fondasi & infrastruktur GRC oleh PT LRTJ dengan mengacu pada:

- Implementasi dan Evaluasi GCG berbasis SK-16/S.MBU/2012.
- Implementasi Manajemen Risiko berbasis ISO 31000: 2018.
- Penyusunan kerangka Manajemen Kepatuhan berbasis ISO 19600: 2014.

3. *Assessment*: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. (Dasar Penilaian dan Metode).

Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di Perusahaan. Penilaian penerapan GCG dilakukan pada tahun 2019 melalui inisiasi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai holding PT LRT Jakarta serta dilakukan serentak dengan seluruh Anak Usaha. PT LRT Jakarta melalui holding melakukan assessment GCG di tahun 2019 dengan dengan Asesor Independen Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Assessment yang dilakukan oleh KNKG menggunakan Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) mengacu kepada SK-16/S.MBU/2012 yang dikembangkan oleh KNKG untuk penilaian di BUMD dan seluruh Anak Usahanya

Beberapa kegiatan GCG di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Pembuatan Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
- Pembuatan Pedoman Manajemen Risiko;
- Pembuatan Pedoman Pelaporan Pelanggaran (*Whistle blowing*);
- Pembuatan Pedoman Code of Conduct;
- Pembuatan Pedoman Manajemen Kepatuhan;
- Pembuatan Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- Pembuatan Board Manual;
- Pembuatan Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Pembuatan Pedoman Keterbukaan Informasi;
- Pembuatan Pedoman Tanggung Jawab Sosial;
- Perubahan struktur organisasi terbaru
- Penyusunan KPI Korporat dan Individu, RKAP, dan RJPP;
- Pembentukan Komite Audit;
- Pemenuhan kebijakan/prosedur (SOP) yang telah dilakukan per masing – masing Divisi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Dasar Penerapan GCG

Dalam mengembangkan infrastruktur dan implementasi prinsip-prinsip GCG, Perusahaan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola yang tertanam dalam tubuh dan budaya Perusahaan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Tujuan penerapan GRC yang baik di PT LRTJ adalah:



Dengan menerapkan GRC yang baik, PT LRT Jakarta diharapkan secara terus menerus dapat mengembangkan manajemen lebih efisien dan efektif serta selalu meraih posisi terdepan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

6. Manfaat Penerapan GCG

- Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan.
- Mendorong dan mendukung perkembangan Perusahaan.
- Mengelola sumber daya secara lebih baik.
- Mengelola risiko secara lebih baik.
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.
- Meningkatkan citra Perusahaan menjadi lebih baik.

7. Prinsip-prinsip GCG

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Good Corporate Governance (GCG). Implementasi manajemen risiko pada seluruh aktivitas usaha yang dilaksanakan perusahaan senantiasa berbasis pada risiko yang dikendalikan secara optimal, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Tujuan manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.

- Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan mengamankan aset perusahaan yang meliputi sumber daya manusia, modal, aktiva, dan reputasi.
- Memberikan suatu kerangka kerja (framework) untuk memenuhi praktik manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di setiap fungsi – fungsi dalam perusahaan.
- Mendorong penerapan manajemen risiko secara terus menerus (continuous improvement) serta meningkatkan nilai tambah kepada pemangku kepentingan.
- Mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham (shareholders) serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Berdasarkan ISO 31000:2018 Pedoman Manajemen Risiko merupakan panduan bagi LRTJ yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh karyawan sebagai acuan penerapan manajemen risiko bagi seluruh unit kerja dengan memperhatikan karakteristik risiko dan cara penanganannya. Adapun Risiko Teratas di LRTJ adalah sebagai berikut:

No.	KPI	Aktifitas	RISIKO	PENYEBAB	TINGKAT RISIKO	MITIGASI
1	Pendapatan Usaha	Pendapatan Subsidi dan Non-Farebox	Nilai subsidi yang dibayar tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan	<ul style="list-style-type: none"> – Ridership tidak terpenuhi – Denda tidak terpenuhinya SPM – Pengurangan DPA terkait situasi pandemik – Kesepakatan nilai subsidi dengan Dishub – Peraturan pembatasan jam 	HIGH	Defisiensi Cost, Alternative Financing, Peningkatan Program Event untuk peningkatan ridership, Pendapatan dari NFB untuk mencover farebox yang tidak tercapai

No.	KPI	Aktifitas	RISIKO	PENYEBAB	TINGKAT RISIKO	MITIGASI
				operasional dan PSBB – Keterlambatan pembayaran subsidi		
2	Pendapatan Usaha	Pendapatan Subsidi dan Non-Farebox	Pendapatan Non Farebox tidak tercapai	<ul style="list-style-type: none"> – Terhambatnya Kerjasama dengan klien dan iklan – Koordinasi yang kurang antar team terkait – Syarat terlalu berat (di kedua belah pihak) <ul style="list-style-type: none"> - Birokrasi terlalu lama (pemenuhan izin) – Lokasi pemasangan ataupun lokasi penyewaan kurang strategis – Fasilitas bermasalah 	HIGH	Ekspansi program event pertahun, Melakukan koordinasi dengan para stakeholders, Sinergitas anak usaha, Kontrak jangka panjang
3	EBITDA Margin	EBITDA / Total Pendapatan	Biaya operasional melonjak tinggi akibat faktor-faktor eksternal	<ul style="list-style-type: none"> – Ketidakcapaian target pendapatan yang berasal dari Farebox dan NFB – Harga pokok biaya operasional yang tinggi 	HIGH	Peningkatan Non Farebox untuk mengcover biaya operasional, melakukan natural hedging (perusahaan memiliki dana simpanan dalam bentuk mata uang kurs asing)

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
(Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 242 Tahun 2015)

Direktur Utama	: 100%
Direksi Lainnya	: Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama
Komisaris	: Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

PT LRT Jakarta	Annual Income
Direktur Utama	826.761.276
Dewan Direksi	744.086.496
Komisaris	372.043.668

Manajemen Kepatuhan

Manajemen Kepatuhan diimplementasikan dan dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- Tercapainya visi dan misi Perusahaan yang berlandaskan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan internal Perusahaan yang berlaku.
- Mewujudkan serta membudayakan Kepatuhan pada semua lini bisnis dan kegiatan usaha Perusahaan.
- Mengoptimalkan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan tetap melaksanakan Good Corporate Governance.
- Peningkatan kesadaran dan disiplin insan Perusahaan terhadap aturan main (rule of the game) dalam seluruh kegiatan usaha Perusahaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Mengelola risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.

Langkah-langkah dalam penerapan manajemen kepatuhan di PT LRTJ dilakukan melalui:

- Analisis kebijakan dan proses penanganan Kepatuhan.
- Melakukan analisis maturitas infrastruktur pengelolaan kepatuhan dan susunan organisasi saat ini.
- Membuat rencana implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang terintegrasi dengan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai dengan Roadmap GRC holding (Jakpro) dan hasil asesmen Maturitas Manajemen Kepatuhan Perusahaan.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun 2019, melaksanakan 6 (enam) kali penyelenggaraan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	29-Mar-2019	Persiapan Operasi, Pemasaran, SDM dan Seragam
2	21-Jun-2019	Laporan uji publik, Subsidi, tarif khusus PLN, gate integrasi, settlement, maintenance service agreement
3	10-Sept-2019	Struktur Organisasi dan Konektivitas Layanan
4	29-Okt-2019	Update Direksi, posisi renumerasi, bonus karyawan, sinergitas anak perusahaan
5	18-Nov-2019	Kesiapan Operasional PT LRT Jakarta
6	19-Des-2019	Laporan Kinerja Keuangan dan Operasional sampai dengan November 2019, RKAP 2020 dan <i>Board Manual</i>

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan unit kerja Perseroan yang melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi (*consultative management*) yang dalam pelaksanaannya memiliki tugas sebagai berikut:

- Membantu Direktur Utama mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, system pengendalian internal dan corporate governance,
- Memberikan saran/usulan perbaikan,
- Mengadakan penilaian atas sistem pengendalian internal.

Audit Eksternal

Akuntan Publik bertugas untuk memastikan kualitas pelaporan dalam informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk periode tahun 2019, Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Biaya Audit untuk tahun buku 2019 dialokasikan dari anggaran konsolidasi dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai induk perusahaan.

Berikut daftar Akuntan Publik Perseroan untuk periode 2018 – 2019:

Tahun	Nama KAP	Jasa Audit
2018	Amir Abadi Jusuf	Laporan Keuangan
2019	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Laporan Keuangan

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Sebagai komitmen keterbukaan bagi seluruh stakeholders, Perseroan telah menyediakan sejumlah media dan saluran. Diantaranya adalah website, penerbitan media internal secara berkala, penyediaan aplikasi LRTJ Apps bagi penumpang serta akun media sosial.

E-mail : info@lrtjakarta.co.id

Situs : www.lrtjakarta.co.id

Instagram : lrtjkt

Twitter : @lrtjkt

Facebook : LRT Jakarta

LinkedIn : PT LRT Jakarta

Alamat : Gedung MCC – Depo LRT Jakarta, Jl. Raya Kelapa Nias,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia 14250

PT LRT JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Halaman

Daftar Isi

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan 1 - 2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 3

Laporan Perubahan Ekuitas 4

Laporan Arus Kas 5

Catatan Atas Laporan Keuangan 6 - 36

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:




1. Nama : Wijanarko
Alamat Kantor : Jl. Raya Kelapa Nias RT000/RW025 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading. Jakarta Utara. 14250
Alamat Rumah : Jl. Mutiara BlokF 25 YK RT 038 / RT 011, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Prov. DIY Yogyakarta, Kota Yogyakarta
Nomor Telepon : 08112284249
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Rudy Hartono
Alamat Kantor : Jl. Raya Kelapa Nias RT000/RW025 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading. Jakarta Utara. 14250
Alamat Rumah : Apartemen Paladian Park Tower A1010, RT 001 / RW 020, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading
Nomor Telepon : 081297947698
Jabatan : Direktur
3. Nama : G. Indarto Wibisono
Alamat Kantor : Jl. Raya Kelapa Nias RT000/RW025 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading. Jakarta Utara. 14250
Alamat Rumah : Gema Pesona Blok Q No. 9 RT 005 / RW 011, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
Nomor Telepon : 0818419062
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT LRT Jakarta;
2. Laporan keuangan PT LRT Jakarta telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT LRT Jakarta telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan PT LRT Jakarta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT LRT Jakarta
 - Wijanarko sebagai Direktur aktif sejak Juli 2019 dan sebagai Direktur Utama sejak Oktober 2019.
 - Rudy Hartono dan G. Indarto sebagai Direktur aktif Oktober 2019.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Direksi,
Jakarta, 4 Mei 2020



Wijanarko
Direktur Utama

Rudy Hartono
Direktur



G. Indarto Wibisono
Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPEDEN

Ref. : R-175/2.0752/AU.1/06/0207-1/1/V/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT LRT Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT LRT Jakarta terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.


Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT LRT Jakarta tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh auditor independen lain, dengan laporan No. 00649/2.1030/AU.1/06/0181-1/1/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan.



Andy Eldes, Ak., CA., CPA 
NRAP: AP.0207

4 Mei 2020



Ref : R-175/2.0752/AU.1/06/0207-1/1/V/2020

PT LRT JAKARTA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 Desember 2019

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2e, 4	66.624.188.751	137.269.727.476
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	2f, 5a	6.063.883.407	-
Pihak Ketiga	2f, 5b	4.535.698	-
Piutang Lain-Lain			
Pihak Berelasi	2g, 6	-	2.359.500.736
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2h, 7	356.353.976	524.666.667
Biaya Dibayar Dimuka	2i, 8	1.112.751.584	458.968.750
Pajak Dibayar Dimuka	2m, 13a	3.300.565.712	134.797.710
Jumlah Aset Lancar		77.462.279.129	140.747.661.339
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - neto	2j, 9	16.174.187.184	694.365.727
Aset Tidak Berwujud - neto	2k, 10	1.724.862.086	1.752.545.455
Aset Pajak Tangguhan	13e	18.497.990.222	3.482.344.128
Jumlah Aset Tidak Lancar		36.397.039.492	5.929.255.310
JUMLAH ASET		113.859.318.621	146.676.916.649

PT LRT JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	2l, 11a	5.137.498.816	406.694.916
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	3.662.877.225	2.992.516.763
Utang Pajak	2n, 13b	586.088.221	210.583.665
Utang Retensi	15	248.190.707	-
Utang Lain-Lain	16	161.728.604	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		9.796.383.573	3.609.795.344
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2o, 14	2.011.348.789	311.462.797
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.011.348.789	311.462.797
JUMLAH LIABILITAS		11.807.732.363	3.921.258.141
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham			
Modal Dasar - 600.000 Saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 150.000 saham	17	150.000.000.000	150.000.000.000
Saldo Rugi		(47.948.413.742)	(7.244.341.492)
JUMLAH EKUITAS		102.051.586.258	142.755.658.508
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		113.859.318.621	146.676.916.649

Jakarta, 4 Mei 2020



RUDY HARTONO
Direktur

PT LRT JAKARTA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Saldo Laba			Jumlah Ekuitas
		Modal Disetor	Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo Pada Tanggal Pendirian (16 April 2018)					
Setoran Modal		150.000.000.000	-	-	150.000.000.000
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan		-	-	(7.244.341.492)	(7.244.341.492)
Saldo per 31 Desember 2018		150.000.000.000	-	(7.244.341.492)	142.755.658.508
Rugi Tahun Berjalan		-	-	(40.376.047.199)	(40.376.047.199)
Rugi Komprehensif Lain Tahun Berjalan		-	-	(328.025.051)	(328.025.051)
Saldo Per 31 Desember 2019		150.000.000.000	-	(47.948.413.742)	102.051.586.258

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

PT LRT JAKARTA
 LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan	2p, 18	6.803.940.369	-
Beban Pokok Penjualan	2p, 19	(12.916.272.058)	-
Rugi Kotor		(6.112.331.689)	-
Beban Usaha			
Beban Pemasaran	2p, 20	(1.096.176.610)	(22.603.100)
Beban Administrasi dan Umum	2p, 21	(54.077.411.040)	(13.924.831.087)
Jumlah Beban Usaha		(55.173.587.650)	(13.947.434.187)
Rugi Usaha		(61.285.919.339)	(13.947.434.187)
Pendapatan (Beban) Lainnya			
Pendapatan Lainnya	22	7.308.843.195	3.961.254.532
Beban Lainnya	22	(1.305.275.464)	(740.505.965)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lainnya		6.003.567.730	3.220.748.567
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan		(55.282.351.609)	(10.726.685.619)
Manfaat Pajak Penghasilan	2n	14.906.304.410	3.482.344.128
Rugi Tahun Berjalan		(40.376.047.199)	(7.244.341.492)
Beban Komprehensif Lain		(437.366.735)	-
Dampak Pajak		109.341.684	-
		(328.025.051)	-
Rugi Komprehensif tahun Berjalan		(40.704.072.250)	(7.244.341.492)

Jakarta, 4 Mei 2020



Rudy Hartono, N
 Direktur

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.d. Instrumen Keuangan (*lanjutan*)

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.d. Instrumen Keuangan (*lanjutan*)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan *(lanjutan)*

2.d. Instrumen Keuangan *(lanjutan)*

(iii) Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada FVTPL

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.d. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (*Fair Value Through Profit or Loss*)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual;
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.c. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- 1) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas tersebut;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Perusahaan menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.b. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, yaitu:

- 1) PSAK 16 (Amandemen 2015): "Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif"
- 2) PSAK 69: " Agrikultur"
- 3) PSAK 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- 4) PSAK 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- 5) PSAK 13 (Amandemen 2017): "Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi"
- 6) PSAK 53 (Amandemen 2017): "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"
- 7) PSAK 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- 8) PSAK 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

PT LRT JAKARTA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT LRT Jakarta ("Perusahaan") didirikan di Jakarta sesuai dengan Akta No. 10 tgl 16 April 2018 tentang Pendirian PT LRT Jakarta, dari Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2018 dengan surat keputusan No. AHU-0020380.AH.01.01 Tahun 2018.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Wiwik Condro, S.H., No.61 tanggal 16 September 2019 tentang perubahan anggaran dasar perusahaan. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0072534.AH.01.02 Tahun 2019.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang konstruksi bangunan sipil, kontruksi khusus, angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, telekomunikasi, real estat, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, periklanan dan penelitian pasar, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, dan pendidikan. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2019.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan akta notaris Wiwik Condro, S.H., No.114 tanggal 29 Oktober 2019 tentang perubahan direksi dan komisaris. Perubahan tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0356174 tanggal 6 November 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Dewan Komisaris :</u>		
Komisaris	Mohammad Hanief Arie Setianto	Satya Heragandhi
<u>Dewan Direksi :</u>		
Direktur Utama	Wijanarko	Allan Tandiono
Direktur	Rudy Hartono	Solihin
Direktur	Gendoet Indarto Wibisono	-

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 171 karyawan dan 19 karyawan (*tidak diaudit*).

PT LRT JAKARTA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas Dari Pelanggan		903.833.954	-
Pembayaran Kas Untuk Beban Usaha Dan Operasional		(19.519.651.514)	(2.359.500.736)
Pembayaran Kas Kepada Pengurus Dan Karyawan		(45.140.826.602)	(9.373.902.382)
Penerimaan Bunga Deposito dan Giro		6.791.678.123	1.504.000.000
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi		<u>(56.964.966.038)</u>	<u>(10.229.403.118)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tidak Berwujud		(9.015.824)	-
Perolehan Aset Tetap		(16.192.786.204)	(2.500.869.406)
Arus Kas Bersih Diperoleh Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>(16.201.802.028)</u>	<u>(2.500.869.406)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Tambahan Setoran Modal		-	150.000.000.000
Penerimaan/Pembayaran Dari Pihak Berelasi		2.521.229.340	-
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan		<u>2.521.229.340</u>	<u>150.000.000.000</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(70.645.538.725)	137.269.727.476
KAS DAN SETARA KAS AWAL		137.269.727.476	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR		<u>66.624.188.751</u>	<u>137.269.727.476</u>

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.n. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal goodwill; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.k. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk wujud fisik. Seluruh aset tidak berwujud diukur dengan model biaya yaitu dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri atas:

- a. Harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat, dan
- b. Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Aset tidak berwujud diamortisasi sebagai berikut:

- a. Amortisasi dilakukan secara sistematis selama umur manfaat.
- b. Metode amortisasi yang digunakan sesuai pola pemanfaatan aset.
- c. Umur manfaat ditentukan berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.
- d. Jumlah yang dapat diamortisasi yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu (nilai residu dianggap nol).

Entitas melakukan revaluasi atas umur manfaat dan metode penyusutan aset tidak berwujud secara periodik. Apabila terdapat perubahan, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif.

2.l. Utang Usaha

Utang usaha adalah liabilitas yang timbul karena pengadaan kebutuhan barang dan / atau jasa untuk pelaksanaan aktivitas operasi Perusahaan. Utang usaha meliputi utang kepada pihak ketiga (vendor) untuk pengadaan barang dan/ Nilai utang usaha yang dimaksud terdiri dari jumlah pokok utang dan bunga (jika ada), dan tidak ada diskon/premium dan biaya transaksi atas utang usaha tersebut. Sehingga secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama dengan jumlah terutang dan tidak ada amortisasi diskon/premium dan biaya transaksi.

Utang usaha dikelompokkan menjadi dua bagian:

- Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal atau pembelian barang atau jasa maupun pinjaman yang diperoleh dari perusahaan afiliasi.
- Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi Perusahaan. Utang ini dicatat jika hak kepemilikan barang sudah berpindah kepada perusahaan. Dilihat dari jumlahnya, yang dicatat adalah sebesar jumlah yang akan dibayar yaitu harga faktur.

2.m. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Aset nonkeuangan diuji atas penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Kerugian atas penurunan nilai diakui di laporan laba rugi sebesar selisih lebih nilai tercatat aset atas jumlah terpulihkan, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.j. Aset Tetap (*lanjutan*)

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

2.g. Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, jasa dari kegiatan diluar kegiatan utama Perusahaan, misalnya piutang pegawai.

2.h. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan Pendapatan Tagihan yang timbul dari penjualan yang telah diakui dan pembayarannya akan diterima yang tagihan invoiceny belum diterbitkan dicatat ke dalam akun pendapatan yang masih harus diterima.

2.i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang akan dialokasikan selama masa manfaat atas masing-masing biaya tersebut. Biaya dibayar di muka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan. Biaya dibayar di muka diakui pada saat pengeluaran uang dilakukan tetapi barang/jasa/ manfaat belum diterima. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat barang/jasa/manfaat diterima atau habis masanya.

2.j. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomi aset sebagai berikut:

<u>Kelompok Aset Tetap</u>	<u>Tahun</u>
Kelompok 1	4
Kelompok 2	8
Kelompok 3	10
Kelompok 4	20
Kelompok 5	30

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.d. Instrumen Keuangan (*lanjutan*)

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan

2.e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi

2.f. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah hak tagih terhadap pihak lain atas pemberian jasa atau barang yang merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuai anggaran dasar. Cadangan Penurunan adalah cadangan penurunan nilai piutang tak tertagih yang sudah 100% (seratus persen) dari jumlah piutang tetap disajikan sebagai bagian dari piutang.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.n. Pajak Penghasilan (*lanjutan*)

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.o. Imbalan Kerja Karyawan

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting *(lanjutan)*

Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual.

b) Estimasi Umur Manfaat

Perusahaan melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut.

c) Imbalan Pascakerja

Nilai kini atas kewajiban imbalan kerja karyawan tergantung dari sejumlah faktor aktuarial yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja karyawan.

d) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan yaitu klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (*lanjutan*)

2.o. Imbalan Kerja Karyawan (*lanjutan*)

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a) Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

a) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dengan cara individual, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

PT LRT JAKARTA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

20. Beban Pemasaran

	2019	2018
Beban Penjualan (Iklan, Pameran, Kegiatan Promosi,dll)		
Beban Exhibition	692.923.151	-
Beban Media	241.366.397	-
Beban Promosi	161.887.062	22.603.100
Total Beban Penjualan	1.096.176.610	22.603.100

21. Beban Umum dan Administrasi

	2019	2018
Beban Pegawai	42.966.423.211	11.367.917.234
Beban Umum	5.095.277.395	2.283.943.629
Beban Jasa Profesional	3.488.254.215	219.012.000
Beban Pemeliharaan	1.799.190.684	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	728.265.535	53.958.224
Total Beban Umum dan Administrasi	54.077.411.040	13.924.831.087

Sampai dengan periode Desember 2019, tercatat beban pegawai sebesar Rp42.966.423.211 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Beban Pegawai		
Gaji	20.966.018.652	6.087.969.567
Tunjangan	6.559.662.182	2.383.587.235
Beban Tantiem dan Jasa Produksi	3.434.660.635	-
Gaji & Tunjangan Pkwt	2.354.785.490	-
Beban Diklat Dan Pelatihan Sertifikasi	2.228.652.509	1.044.481.852
Beban PPh Karyawan	2.093.843.200	276.011.400
Beban BPJS Ketenagakerjaan	1.493.588.561	339.836.507
Beban Manfaat Karyawan	1.262.519.257	311.462.797
Beban Premi Asuransi	829.178.140	479.636.850
Beban BPJS Kesehatan	696.114.289	67.858.510
Beban Pengobatan	312.913.794	60.942.104
Pakaian Dinas	239.688.139	68.455.000
Lembur	4.820.000	144.715.764
Beban Pegawai Lainnya	489.978.363	102.959.648
Total Beban Umum dan Administrasi	42.966.423.211	11.367.917.234

PT LRT JAKARTA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. Modal Saham (lanjutan)

Komposisi dan susunan pemegang saham per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Nominal	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Jakarta Propertindo	148.500	1.000.000	99%	148.500.000.000
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	1.500	1.000.000	1%	1.500.000.000
Jumlah Modal Saham	150.000		100%	150.000.000.000

18. Pendapatan

	2019	2018
Pendapatan Operasi		
Kompensasi Pemerintah	2.744.477.252	-
Kompensasi Pemerintah	3.319.406.155	-
Pendapatan Farebox	719.433.600	-
Pendapatan Non Farebox	20.623.362	-
Total Pendapatan Operasi	6.803.940.369	-

Dengan dimulainya operasi komersial Perusahaan sejak tanggal 1 Desember 2019, maka periode Desember 2019 mulai membukukan pendapatan. Total pendapatan dari penjualan tiket tercatat Rp719.433.600, dan pendapatan dari Kompensasi Pemerintah, yaitu sebesar Rp2.744.477.252 untuk subsidi sarana dan Rp3.319.406.155 untuk subsidi prasarana.

19. Beban Pokok Penjualan

	2019	2018
Beban Operasi Sarana		
Beban Perawatan Dan Operasi Sarana Perkeretaapian	8.091.332.212	-
Beban Overhead Sarana	3.545.881.430	-
Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian		
Beban Penyusutan - Peralatan Kerja & Pendukung Sarana	1.765.000	-
Beban Operasi Prasarana Dan Fasilitas Operasi		
Beban Overhead Prasarana Dan Fasilitas Operasi	1.257.660.012	-
Beban Penyusutan Prasarana		
Beban Penyusutan - Peralatan Kerja & Pendukung Sarana	10.675.071	-
Beban Penyusutan Fasilitas Operasi Perkeretaapian	8.958.333	-
Total Beban Pokok Penjualan	12.916.272.058	-

PT LRT JAKARTA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

	2019	2018
Liabilitas bersih - awal tahun	311.462.797	-
Beban yang diakui ditahun berjalan	1.262.519.257	311.462.797
Kerugian aktuarial	437.366.735	-
Jumlah Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2.011.348.789	311.462.797

Beban imbalan pasca kerja per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dinilai oleh Perusahaan Konsultan Aktuaria PT Katsir Imam Sapto Sejahtera pada tanggal 15 April 2020 dan 12 Maret 2019 berdasarkan *Projected Unit Credit Method (PUC Method)* dengan asumsi perhitungan pegawai 171 orang dan 19 Orang, Tingkat Bunga 7,6 % dan 8 % , usia pensiun 56 tahun serta Tingkat Kenaikan Gaji 8 % per tahun.

15. Utang Retensi

	2019	2018
Utang Retensi	248.190.707	-
Total Utang Retensi	248.190.707	-

Utang retensi merupakan utang kepada kontraktor atas pekerjaan perangkat jaringan gedung MCC, penambahan renovasi gedung, penyediaan & pemasangan UPS, dan penyediaan & instalasi gate AFC.

16. Utang Lain-Lain

	2019	2018
Utang Lain-Lain	161.728.604	-
Total Utang Lain-Lain	161.728.604	-

17. Modal Saham

Berdasarkan Akta No. 10 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn tanggal 16 April 2018, yang berisi tentang pendirian Perseroan Terbatas yang bernama PT LRT Jakarta. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp600.000.000.000 terbagi atas 600.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Para Pemegang Saham sebesar 25% atau sejumlah 150.000 saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000. Akta ini juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0020380.AH.01.01. tanggal 17 April 2018.

PT LRT JAKARTA**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. Perpajakan (lanjutan)**d. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan rugi kena pajak adalah sebagai

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	(55.282.351.609)	(10.726.685.619)
Perbedaan Temporer Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.262.519.257	311.462.797
Jumlah	1.262.519.257	311.462.797
Perbedaan Tetap Beban yang tidak dapat dikurangkan Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Pajak Final	1.225.889.829 (5.568.755.860)	448.495.384 (3.962.649.073)
Jumlah	(4.342.866.031)	(3.514.153.689)
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(58.362.698.383)	(13.929.376.512)
Saldo awal rugi fiskal tahun lalu	(13.617.913.715)	-
Saldo akhir	(71.980.612.098)	(13.617.913.715)

e. Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan Perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018 berikut ikhtisar mutasi perubahannya selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi</u>	<u>Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>2019</u>
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	77.865.699	315.629.814	109.341.684	502.837.197
Pengakuan Rugi Fiskal	3.404.478.429	14.590.674.596	-	17.995.153.025
Jumlah	3.482.344.128	14.906.304.410	109.341.684	18.497.990.222

PT LRT JAKARTA**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019****(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)****12. Biaya Yang Masih Harus Dibayar**

	2019	2018
Beban Karyawan	3.484.583.071	1.189.351.922
Top Up Kas Kecil - Divisi Corsec	23.594.761	-
Jasa Konsultan Design Interior LRT Jakarta-PT Morphosa Indonesia	11.610.000	89.100.000
Biaya Implementasi Sistem ERP 365-PT Kreatif Dinamika Integrasi	-	1.428.000.000
Premi Tambahan Asuransi Karyawan- PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	-	90.656.500
Jasa Konsultan Website PT LRT Jakarta-CV Jogjacamp	-	78.232.000
Jasa Konsultan Advertising-Eka Pujiati/Utum Mochdi	-	32.000.000
Top Up Kas Kecil - Divisi Dukungan Kerja	-	28.867.887
Top Up Kas Kecil - Divisi Keuangan	-	28.540.104
Penggantian Biaya Hotel & Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Komisaris	-	27.768.350
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.662.877.225	2.992.516.763

13. Perpajakan**a. Pajak Dibayar Dimuka**

	2019	2018
PPN Masukan	3.300.565.712	134.797.710
Total Pajak Dibayar Dimuka	3.300.565.712	134.797.710

b. Utang Pajak

	2019	2018
Utang PPh 21	480.735.467	182.737.612
Utang PPh 22	33.000	-
Utang PPh 23	93.881.323	23.526.053
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2 (PPh Final)	11.026.095	4.320.000
Utang PPN Keluaran	412.336	-
Jumlah Utang Pajak	586.088.221	210.583.665

c. Beban Pajak Penghasilan

	2019	2018
Pajak Kini	-	-
Pajak Tangguhan	14.906.304.410	3.482.344.128
Jumlah Manfaat Pajak - Bersih	14.906.304.410	3.482.344.128

PT LRT JAKARTA
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. Aset Tidak Berwujud

	2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Sistem ERP	-	-	-	1.761.561.279	1.761.561.279
Aset dalam penyelesaian- Sistem ERP	1.752.545.455	9.015.824	-	(1.761.561.279)	-
Jumlah	1.752.545.455	9.015.824	-	-	1.761.561.279
Akumulasi Amortisasi					
Sistem ERP	-	36.699.193	-	-	36.699.193
Jumlah	-	36.699.193	-	-	36.699.193
Nilai Bersih	1.752.545.455				1.724.862.086
	2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Aset dalam penyelesaian Sistem ERP	-	1.752.545.455	-	-	1.752.545.455
Nilai Bersih	-	1.752.545.455	-	-	1.752.545.455

Aset tidak berwujud merupakan perolehan atas Implementasi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP).

11. Utang Usaha

	2019	2018
Pihak Ketiga		
PT Esa Garda Pratama	2.184.400.135	-
PT AJ Central Asia Raya	705.491.246	-
PT ISS Indonesia	703.800.000	-
PT Suprima Mitra Adihusada	486.793.308	-
PT Kreatif Dinamika Integrasi	87.627.273	350.509.091
Utang Pihak Ketiga dibawah Rp250.000.000	969.386.854	56.185.825
Jumlah Utang Usaha	5.137.498.816	406.694.916

PT LRT JAKARTA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. Aset Tetap (lanjutan)

	2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklassifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Aset Sarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-
Aset Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-
Gedung	-	-	-	-	-
Aset Renovasi Gedung	-	-	-	-	-
Inventaris Kantor	-	748.323.951	-	-	748.323.951
Jumlah	-	748.323.951	-	-	748.323.951
Akumulasi Penyusutan					
Aset Sarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-
Aset Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-
Gedung	-	-	-	-	-
Aset Renovasi Gedung	-	-	-	-	-
Inventaris Kantor	-	53.958.224	-	-	53.958.224
Jumlah	-	53.958.224	-	-	53.958.224
Nilai Bersih Aset Tetap	-				694.365.727

Total nilai aset tetap 2019 tercatat sebesar Rp16.941.110.155, dengan nilai aset terbesar adalah aset renovasi gedung, tercatat sebesar Rp8.095.594.333, dimana aset ini adalah kontrak tunggal dengan kontraktor jasa konstruksi interior untuk gedung kantor di Depo LRT Jakarta, Inventaris kantor tercatat sebesar Rp7.641.664.459, adalah inventaris kantor seperti komputer & elektronik, furniture, mesin-mesin kantor, dll. Sementara untuk aset sarana & prasarana hanya berupa alat-alat penunjang, dikarenakan aset sarana dan prasarana masih tercatat di PT Jakarta Propertindo dan belum diserahkan ke PT LRT Jakarta.

Beban depresiasi dialokasikan sebagai berikut:

	2019	2018
Beban pokok penjualan (Catatan 19)	21.398.404	-
Biaya administrasi dan umum (Catatan 21)	691.566.342	53.958.224
Jumlah	712.964.746	53.958.224

PT LRT JAKARTA**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019****(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)****7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima (lanjutan)**

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan data mining penjualan tiket melalui kartu uang elektronik yang masih tertunda dan akan dibayarkan oleh pihak bank ketika data mining dinyatakan valid serta piutang bunga deposito yang diperhitungkan selama 21 hari terhitung dari 10 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

8. Biaya Dibayar Dimuka

	2019	2018
Premi Asuransi Rawat Inap Karyawan	554.118.435	458.968.750
Surat Permohonan Uang Muka (SPU)	325.781.150	-
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	232.852.000	-
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	1.112.751.584	458.968.750

SPU yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yaitu atas acara Bunataru, acara workshop & media gathering dan kegiatan media & komunikasi operasi komersial.

Premi asuransi rawat inap karyawan perusahaan PT LRT Jakarta kepada PT AJ Central Asia Raya (CAR).

Biaya dibayar dimuka lainnya yang merupakan Lisensi Microsoft Dynamics 365 untuk satu tahun dan Software Talenta HR-Pro untuk satu tahun.

9. Aset Tetap

	2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklassifikasi	
Biaya Perolehan					
Aset Sarana Perkeretaapian	-	28.240.000	-	-	28.240.000
Aset Prasarana Perkeretaapian	-	1.175.611.363	-	-	1.175.611.363
Aset Renovasi Gedung	-	8.095.594.333	-	-	8.095.594.333
Inventaris Kantor	748.323.951	6.893.340.508	-	-	7.641.664.459
Jumlah	748.323.951	16.192.786.204	-	-	16.941.110.155
Akumulasi Penyusutan					
Aset Sarana Perkeretaapian	-	1.765.000	-	-	1.765.000
Aset Prasarana Perkeretaapian	-	19.633.404	-	-	19.633.404
Aset Renovasi Gedung	-	84.329.108	-	-	84.329.108
Inventaris Kantor	53.958.224	607.237.234	-	-	661.195.458
Jumlah	53.958.224	712.964.746	-	-	766.922.970
Nilai Bersih Aset Tetap	694.365.727				16.174.187.184

PT LRT JAKARTA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Piutang Usaha

	2019	2018
a. Pihak Berelasi		
PT Jakarta Propertindo	6.063.883.407	-
Jumlah Piutang Pihak Berelasi	6.063.883.407	-
b. Pihak Ketiga		
Piutang Dengan Pihak Ketiga	4.535.698	-
Jumlah Piutang Pihak Ketiga	4.535.698	-
Jumlah Piutang Usaha	6.068.419.105	-

Piutang Usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.063.883.407 merupakan piutang pihak berelasi ke PT Jakarta Propertindo atas nilai subsidi yang akan diterima oleh Perusahaan.

6. Piutang Lain-Lain

	2019	2018
Pihak Berelasi		
PT Jakarta Propertindo	-	2.359.500.736
Jumlah Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi	-	2.359.500.736

7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

	2019	2018
<i>Settlement</i> Kartu Uang Elektronik	217.160.428	-
Jumlah <i>Settlement</i> Kartu Uang Elektronik	217.160.428	-
Piutang Bunga Deposito		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	58.548.387	96.000.000
PT Bank DKI	56.451.613	70.000.000
PT Bank Mandiri Taspen	24.193.548	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	116.666.667
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	96.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	96.000.000
PT Bank Mega Tbk	-	50.000.000
Jumlah Piutang Bunga Deposito	139.193.548	524.666.667
Total Pendapatan yang Masih Harus Diterima	356.353.976	524.666.667

PT LRT JAKARTA
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Kas dan Setara Kas

	2019	2018
Kas		
Kas Operasional	521.894.100	-
Kas PSM	196.844.000	-
Kas TVM	253.815.000	-
Kas Kecil	120.000.000	39.330.127
Kas Besar	96.491.988	114.431.074
Jumlah Kas	1.189.045.088	153.761.201
Bank IDR		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.804.807.086	27.115.966.275
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	103.771.877	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	65.247.696	-
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk	395.071.424	-
PT Bank DKI	66.245.580	-
Jumlah Bank	5.435.143.663	27.115.966.275
Deposito IDR		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	25.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank DKI	25.000.000.000	15.000.000.000
PT Bank Mandiri Taspen	10.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	25.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	20.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	20.000.000.000
PT Bank Mega	-	10.000.000.000
Jumlah Deposito	60.000.000.000	110.000.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	66.624.188.751	137.269.727.476

Deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan ARO per 31 Desember 2019 senilai total Rp 60.000.000.000 dengan suku bunga 7% - 7.5%.

PT LRT JAKARTA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

21. Beban Umum dan Administrasi (lanjutan)

Sedangkan untuk beban umum per Desember 2019, tercatat sebesar Rp5.095.277.395 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Beban Umum		
Beban Sewa Kendaraan Operasional	1.236.991.326	408.738.111
Beban Pembinaan Karyawan	634.180.906	-
Beban Rapat Kerja Internal/Eksternal	505.128.375	132.013.496
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.357.917	209.760.030
Beban Hse (K3)	318.456.218	11.190.000
Beban Atk Dan Apk	287.644.518	403.396.093
Beban Sewa Peralatan Kantor	284.817.000	35.119.625
Beban Kerumahtanggaan Lainnya	210.380.423	219.134.404
Beban Kesekretariatan	190.890.651	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	164.278.503	308.958.744
Beban Bahan Habis Pakai - P3K	162.262.200	-
Beban Internet Kantor	119.426.000	-
Beban Percetakan	104.527.602	5.060.000
Beban Bbm Dan Transport Operasional	94.998.050	49.021.401
Beban Donasi Dan Sponsorship	83.363.783	40.000.000
Beban Bahan Habis Pakai - Pemeliharaan	70.198.955	31.421.282
Beban Perizinan Dan Legalitas	67.080.000	78.720.000
Beban Bahan Habis Pakai - Makanan	62.808.454	4.506.366
Beban Jamuan Khusus	51.295.000	39.306.580
Beban Telepon, Faximile	33.499.566	-
Beban Sewa Kantor	24.957.200	15.427.600
Beban Outsourcing Kantor Operasional	20.000.000	-
Beban Pemeliharaan Kantor	19.230.000	278.100.000
Beban Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan	10.661.760	149.900
Beban Pos Dan Pengiriman	842.987	-
Beban Akomodasi Tamu Internal/Eksternal	-	12.139.997
Beban Asuransi	-	1.780.000
Total Beban Umum	5.095.277.395	2.283.943.629

PT LRT JAKARTA**Catatan atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019****(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)****21. Beban Umum dan Administrasi (lanjutan)**

Sampai dengan periode Desember 2019, tercatat beban jasa profesional sebesar Rp3.488.254.215 dengan rincian sebagai

	2019	2018
Beban Jasa Profesional		
Jasa Konsultan Kajian Non-Farebox	2.862.425.400	-
Jasa Job Evaluation	375.000.000	-
Jasa Konsultasi Penerapan & Sertifikasi Sistem Manajeme K3	61.802.500	-
Jasa Konsultan Penyusunan Konsep Desain Signage Stasiun	88.000.000	-
Jasa Konsultan Hukum - PKS Jakpro dan LRTJ	44.000.000	-
Jasa Konsultan Hukum - Konsultasi terkait subsidi	25.000.000	-
Jasa Notaris - Pernyataan Sirkular Para Pemegang Saham	21.500.000	-
Pekerjaan Jasa Konsultasi Ketenagakerjaan	10.526.315	-
Beban Fasilitator Acara Management Retreat	-	50.000.000
Jasa Konsultan Pembuatan Website PT LRT Jakarta-Term 1	-	17.780.000
Jasa Freelance Design Grafis Selama 1 Bulan	-	9.000.000
Jasa Konsultasi Periklanan Media Luar Ruang & Penentuan Harga	-	32.000.000
Pembayaran Jasa Konsultan Website	-	78.232.000
Jasa Konsultan Advertising	-	32.000.000
Total Beban Jasa Profesional	3.488.254.215	219.012.000

Sampai dengan periode Desember 2019, tercatat beban penyusutan sebesar Rp728.265.535 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	607.237.234	53.958.224
Beban Penyusutan Aset Renovasi Gedung	84.329.108	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	36.699.193	-
Total Beban Penyusutan	728.265.535	53.958.224

PT LRT JAKARTA
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

22. Pendapatan (Beban) Lainnya

	2019	2018
Pendapatan Lain-Lain		
Bunga Deposito	6.406.785.789	2.550.927.582
Jasa Giro	384.892.334	1.408.921.490
Penghasilan Lain-Lain	517.165.071	1.405.459
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	7.308.843.195	3.961.254.532
Beban Lain-Lain		
Beban Pajak Deposito	1.222.922.263	594.075.999
Administrasi Bank	82.353.201	146.429.965
Beban Lain-Lain	-	-
Beban Lainnya	1.305.275.464	740.505.965
Total Pendapatan (Beban) Lainnya	6.003.567.730	3.220.748.567

23. Transaksi dengan Pihak Berelasi

a. Sifat hubungan dan transaksi

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT Bank DKI	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Daerah	Penempatan Bank dan Deposito
PT Jakarta Propertindo	Entitas Induk	Piutang, Utang Dividen

b. Saldo akhir yang timbul dari transaksi pihak berelasi:

	2019	2018
Kas dan Setara Kas		
PT Bank DKI	25.066.245.580	15.000.000.000
Piutang Usaha		
PT Jakarta Propertindo	6.063.883.407	-
Piutang Lain-lain		
PT Jakarta Propertindo	-	2.359.500.736
Jumlah	31.130.128.987	17.359.500.736
Persentase terhadap total aset	27%	12%

PT LRT JAKARTA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

24. Perjanjian dan Perikatan Penting

Pada tanggal 20 September 2019, Perusahaan bekerjasama dengan PT Jakarta Proptindo mengenai Kerjasama Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Koridor I Fase I Velodrome - Kelapa Gading, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan perawatan Sarana dan Prasarana LRT Jakarta.
2. Kegiatan pengoperasian Sarana dan Prasarana LRT Jakarta meliputi:
 - a. Pengoperasian Sarana LRT Jakarta; dan
 - b. Pengoperasian Prasarana LRT Jakarta yang terdiri dari:
 - I. pengoperasian sistem jalan rel;
 - II. pengoperasian sistem jembatan/jalur layang;
 - III. pengoperasian sistem stasiun;
 - IV. pengoperasian sistem peralatan persinyalan;
 - V. pengoperasian sistem peralatan telekomunikasi;
 - VI. pengoperasian sistem instalasi listrik;
 - VII. pengoperasian sistem tiket; dan
 - VIII. pengoperasian sistem/fasilitas peralatan pendukung lainnya.
3. Kegiatan perawatan Sarana dan Prasarana LRT Jakarta meliputi:
 - a. Perawatan berkala; dan
 - b. Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
4. Penggunaan dan atau perusahaan atas Sarana dan Prasarana akan diatur oleh Para Pihak dalam perjanjian terpisah.

Jangka waktu perjanjian terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 30 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

27. Standar dan Interpretasi yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2019.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73: "Sewa"
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif."

28. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri properti, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Grup. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Grup.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan". Peraturan ini di antaranya mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% untuk tahun pajak 2022.

29. Tangung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang diselesaikan pada tanggal 4 Mei 2020.

PT LRT JAKARTA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

25. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko pemeliharaan rasio modal. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi fleksibilitas kontraktualnya. Berikut ini eksposur piutang dalam laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	31 Desember 2019		
	Jumlah	> 1 tahun	< 1 tahun
Piutang usaha	6.068.419.105	-	6.068.419.105
Jumlah	6.068.419.105	-	6.068.419.105

	31 Desember 2018		
	Jumlah	> 1 tahun	< 1 tahun
Piutang lain-lain	2.359.500.736	-	2.359.500.736
Jumlah	-	-	-

Perusahaan tidak membentuk cadangan kecukupan penurunan nilai berdasarkan estimasi arus kas dimasa depan baik secara individu maupun secara kelompok dengan profile risiko serupa per 31 Desember 2019 dan 2018.

26. Reklasifikasi Akun


Perusahaan telah melakukan reklasifikasi akun tahun 2018 sebagai berikut:


	Sebelum	Reklasifikasi	Sesudah
Aset Lain-Lain	1.752.545.455	(1.752.545.455)	-
Aset Tidak Berwujud - neto	-	1.752.545.455	1.752.545.455



PT LRT JAKARTA

Gedung MCC - Depo LRT Jakarta, Jl. Raya Kelapa Nias,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14250

 (+62) 21 80617490

 LRTJakarta

 lrtjakarta.co.id

 @lrtjkt